



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT SEMENTARA RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI
DENGAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI**

**(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, DAN
KELAUTAN)**

- Tahun Sidang : 2020-2021
Masa Persidangan : I (satu)
Rapat Ke : 16
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Rabu, 23 September 2020
Waktu : 10.30-15.20 WIB
Tempat : Kantor/ Rumah masing-masing (rapat secara virtual)
- Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI)
Acara : Penyesuaian RKA K/L TA.2020 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran.
- Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy/Kabag Sekretariat Komisi IV DPR RI
- Hadir : A. Anggota DPR RI :
dari 41 orang 54 Anggota Komisi IV dengan rincian :
1. Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP)
11 dari 12 orang Anggota
 1. Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI
 2. H. Sunarna, S.E., M.Hum.
 3. Ir. Mindo Sianipar
 4. Ir. Effendi Sianipar
 5. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.
 6. Vita Ervina, S.E., MBA.
 7. Drs. I Made Urip, M.Si.
 8. H. Yadi Srimulyadi
 9. Dr. H. Sutrisno, S.E., M.Si.
 10. Maria Lestari, S.Pd.
 11. Riezky Aprilia, SH., MH.

2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG)
5 dari 8 orang Anggota
 1. H. Dedi Mulyadi, S.H./Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
 2. H.M. Salim Fakhry, S.E., M.M.
 3. Budhy Setiawan
 4. Ir. Ichsan Firdaus
 5. Ir. Panggah Susanto, M.M.
3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra)
6 dari 7 orang Anggota
 1. G. Budiastrio Djiwandono/Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
 2. Ir. KRT. H. Darori Wonodipuro, M.M.
 3. Renny Astuti, S.H., S.PN.
 4. Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari Dess, M.Sc.
 5. Ir. H. T. A. Khalid, M.M.
 6. Dr. H. Azikin Solthan, M.Si.
4. Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-Nasdem)
4 dari 6 orang Anggota
 1. Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si./Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.
 2. H. Sulaeman L Hamzah
 3. Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.
 4. Ir. Charles Meikyansah
5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)
3 dari 6 orang Anggota
 1. Daniel Johan, S.E./Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
 2. H. Muhtarom, S.Sos
 3. Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.P.A
6. Fraksi Partai Demokrat (F-PD)
4 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. H. Suhardi Duka, M.M.
 2. Muslim, S.HI., M.M
 3. Hj. Nur'aeni, s.Sos, M.Si.
 4. Bambang Purwanto, S.ST., M.H.
7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)
4 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
 2. Dr. H. Andi Akmal Pasludin, S.P., M.M
 3. H. Johan Rosihan, S.T.
 4. Drs. Hamid Noor Yasin, M.M
8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)
3 dari 4 orang Anggota
 1. Haerudin, S.Ag., M.H.
 2. H. Muhammad Syafrudin, ST., M.M.
 3. Slamet Ariyadi, S.Psi.

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)

1 dari 2 orang Anggota

1. K.H. Asep A. Maoshul Affandy, S.Sy.

A. Pemerintah:

1. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
2. Ir. Laksmi Wijayanti, MCP. (Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
3. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
4. Ir. Wiratno, M.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
5. Ir. Hudoyo, M.M. (Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
6. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
7. Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr. (Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
8. Drs. M. R. Karliansyah, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL));
9. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
10. Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
11. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
12. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);

13. Ir. Helmi Basalamah, M.M. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
14. Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. (Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
15. Ir. Nazir Foad, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut);
16. Natalas Anis Harjanto (Direktur Perhutanan Sosial Perum Perhutani);
17. Ir. Agus Setya Prastawa, M.B.A. (Direktur Utama PT Inhutani I);
18. Ir. Sangudi Muhamad, M.M. (Plt. Direktur Utama PT Inhutani II);
19. Ir. B. M. Setio Baskoro (Direktur Utama PT Inhutani III);
20. Ir. Andi Purwadi, M.M. (Plt. Direktur Utama PT Inhutani IV); dan
21. Ir. Bakhrizal Bakri, M.M. (Plt. Direktur Utama PT Inhutani V).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,
Yang terhormat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta jajaran,
Yang terhormat Kepala Badan Restorasi Gambut beserta jajaran,
Yang terhormat Direktur Utama Perum Perhutani atau yang mewakili,
Yang terhormat Direktur Utama Inhutani I sampai V,
Hadirin yang kami hormati.

Mengawali rapat hari ini pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Kerja hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat, walaupun saat ini pandemi COVID-19 cukup membahayakan, karena semakin lama semakin meningkat yang terkena dampak COVID.

Sesuai dengan jadwal acara rapat hari ini Masa Sidang I Tahun Sidang 2020-2012, yang telah diputuskan dalam pengganti Bamus pada tanggal 13 Juli 2020 dan keputusan Rapat Internal pada tanggal 24 Agustus, pada hari ini Rabu tanggal 23 September 2020, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka membahas penyesuaian RKA K/L tahun 2021 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Bapak, Ibu yang kami hormati.

Sesuai dengan ketentuan 276 Ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Rapat Kerja hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.30 WIB)

Rapat Kerja hari ini kita mulai dari pukul 10.30 WIB dan akan dihadiri pukul 14.30 WIB. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 254 Ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib atau atas kesepakatan bersama. Adapun susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat;
2. Penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap agenda rapat hari ini;

3. Tanggapan Anggota Komisi IV DPR RI;
4. Jawaban Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Kesimpulan Rapat;
6. Penutup.

Apakah acara ini dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Perlu kami sampaikan bahwa tugas Komisi dalam bidang anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib, yaitu membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi berdasarkan hasil sinkronisasi alokasi anggaran Kementerian/Lembaga oleh Badan Anggaran dan Komisi menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan Komisi sebagai bahan akhir penetapan APBN.

Hari ini adalah hari terakhir kami harus menyerahkan, menyerahkan semua hasil Rapat Kerja kepada Badan Anggaran. Hal ini juga diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) sampai dengan Ayat (4) bahwa Anggota Badan Anggaran dan Komisi bersama Badan Anggaran membahas alokasi anggaran Kementerian/Lembaga yang telah diputuskan oleh Komisi, hasil pembahasannya disampaikan kembali kepada Komisi yang bersangkutan secara tertulis. Selanjutnya Komisi beserta mitra kerja membahas alokasi anggaran dan hasil pembahasan disampaikan oleh Komisi kepada Badan Anggaran.

Bapak, Ibu yang kami hormati.

Rapat Kerja hari ini merupakan tindak lanjut Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup pada tanggal 14 September 2020, serta Rapat Dengar Pendapat dalam rangka pembahasan dan pedalaman RKA K/L Tahun 2021. Yang mana dalam rapat yang dimaksud terdapat beberapa butir penting yang harus ditindak lanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

1. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menaikkan Pagu anggaran pengadaan bibit tanaman hutan produktif berkualitas untuk Tahun Anggaran 2021.
2. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menaikkan Pagu anggaran tahun 2021 pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya dalam rangka mendukung percepatan kegiatan pengelolaan limbah medis yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan dalam penanganan pandemi COVID-19.
3. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar fokus perencanaan program kerja tahun anggaran 2021 diarahkan untuk mendukung program yang berdampak langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam

dan di sekitar kawasan hutan, termasuk di dalamnya program pengembangan desa wisata di sekitar kawasan hutan serta program peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Selanjutnya dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan surat Pimpinan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor AG/11022/DPRRI/IX/2020, tanggal 17 September 2020, perihal penyampaian hasil pembahasan Rencana Undang-Undang APBN tahun 2021 telah disepakati alokasi anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan anggaran 2021 sebesar Rp7.957 miliar. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan melakukan pembahasan penyempurnaan atas RKA K/L Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan anggaran 2021 sebagai bahan penetapan.

Bapak, Ibu yang kami hormati.

Demikian pengantar kami sampaikan, selanjutnya kami persilahkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan penjelasan terkait hal tersebut di atas. Tapi sebelum dilanjutkan Rapat Kerja terakhir, kami dari Komisi IV DPR RI meminta perihal pengecekan yang konon katanya ada 30 ribu hektar di Humbang di Sumatera Utara yang untuk tanaman bawang putih, bawang merah serta kentang. Waktu saya minta langsung dalam Rapat Kerja untuk dilaporkan hari. Dan saya minta kepada tim yang ngecek harus saya tekankan lagi, harus ada kejujuran, mungkin di sini pejabat pegang data, saya pun pegang data juga. Berapa luasan yang bisa ditanam, berapa luasan yang tidak bisa ditanam, apakah titik lokasinya ini yang dimaksudkan oleh Pemerintah Daerah ini yang dimaksudkan Kementerian Pertanian ini. Kurang lebih seperti itu jawabannya.

Ya, silakan Ibu Menteri.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc.):

Terima kasih.

Yang kami hormati Pak Ketua, Pimpinan Rapat.

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi IV DPR RI,
Yang kami hormati Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI.

Pertama kami juga menyampaikan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih atas Rapat Kerja hari ini. Sesuai dengan surat dari yang terhormat Pimpinan DPR RI dan seperti kita pahami bersama bahwa Rapat Kerja hari ini merupakan tindak lanjut dari dua kali Rapat

Kerja bersama Menteri terkait dengan anggaran dan juga Rapat Dengar Pendapat dengan para pejabat Eselon I KLHK. Dan hari ini seperti tadi yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ketua, bahwa akan dibahas akhir dan ditetapkan alokasi anggaran sebagai hasil dari sinkronisasi.

Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati.

Dalam Rapat Kerja yang lalu dan Rapat Dengar Pendapat Kementerian LHK mencatat dengan baik. Dan hari menyampaikan ringkasan dari hal-hal yang telah kami perhatikan dari catatan-catatan yang terhormat Ibu dan Bapak Anggota serta Pimpinan, berkaitan dengan perhatian atas hal-hal dan program-program untuk masyarakat dan juga eksplorasi dari catatan-catatan dan rambu-rambu yang harus menjadi perhatian KLHK. Tadi sudah disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ketua, yaitu berkaitan dengan menaikkan Pagu dari 50 juta ya Pagu untuk kebun bibit standar, kemudian juga untuk kegiatan di PSLB3 dan juga untuk hal-hal yang secara langsung berdampak pada masyarakat.

Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati.

Secara umum sebetulnya kalau dihitung seluruh anggaran KLHK itu hampir 70%-an itu menopang program prioritas nasional. Jadi apa-apa yang disampaikan sebagai catatan dari yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI itu telah kami mencoba selaraskan. Dan tentu saja kami percaya bahwa sesuai dengan fungsi pengawasan hal ini sepanjang tahun dan sepanjang waktu akan menjadi perhatian dari yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI.

Izinkan kami melaporkan rapat atau materi rapat pada hari ini, yaitu berkaitan dengan laporan singkat tentang realisasi anggaran pada tahun 2020 dan nanti kami sampaikan tentang Rencana Kerja Anggaran RKA K/L Tahun 2021. Dan nanti saya mohon izin juga melaporkan berkenaan dengan Sumatera Utara Humbang Hasundutan sebagaimana tadi catatan yang terhormat Pak Ketua.

Pada halaman 4 dan halaman 5, mohon izin dan mohon periksa bahwa realisasi anggaran pada hari ini di dalam laporan kami masih tertanggal 21 September, yaitu 49,23% dan dibandingkan dengan rata-rata nasional yaitu 56,2%. Nah, ini setelah ada penambahan Pagu kira-kira Rp800 miliar. Sebelumnya Pimpinan dan Ibu, Bapak Anggota yang kami hormati, sebetulnya KLHK sudah mencapai angka 52% kemajuan dibandingkan nasional 53%. Jadi sebetulnya kita berusaha bekerja keras untuk mengejar. Jadi per tanggal 9 September seperti itu kondisinya, tapi dengan adanya penambahan Pagu, maka kita jadi recordnya 49,23% pada tanggal 21 dan per hari ini jam 8.30 WIB tercatat 49,73% jadi kemarin tanggal 21 49,23%.

Kalau kita lihat datanya maka PSKL yang masih di bawah 56% itu Sekretariat Jenderal, Badan Litbang, PSKL ini masih yang di bawah 50% katakanlah Planologi ini karena juga ada tambahan Pagu dari 350 yang

lalu menjadi 430. Kemudian PDASHL juga ada penambahan Pagu dari 1,79 menjadi 2,2. Lalu BRG juga karena ada penambahan Pagu juga dari 239 menjadi 240-an dan juga PPKL. Jadi kementerian berusaha untuk terus mengejar realisasinya, karena kebanyakan masih bersifat kontrak dan seperti PPKL misalnya nanti di bulan Oktober dia akan bisa terangkat naik, juga yang PSLB3 dan PDASHL sedang terus dipersiapkan terutama dengan tambahan Pagu 400-an atau 300-an sampai 400 miliar itu untuk menanam mangrove. Pada dasarnya sesuai dengan rencana yang pernah kami laporkan juga di Rapat Kerja yang mulia ini, bahwa rencana untuk Padat Karya Mangrove akan kita lakukan bersama-sama juga yang terhormat Anggota pada saat di lapangan, tapi kita tetap juga dengan mewaspadai protokol COVID.

Selanjutnya memperhatikan hasil Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 9 September 2020 dan Rapat Kerja pada tanggal 14 September 2020, kami laporkan dan mohon periksa pada screen 7 bahwa dilakukan penyesuaian Pagu anggaran tahun 2021 untuk Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, kemudian Direktorat Jenderal PDASHL, kemudian PSKL, kemudian PSLB3 dan PPKL sebagaimana catatan-catatan dari yang terhormat Anggota dan Pimpinan Komisi IV DPR RI.

Saya tadi pagi menanyakan kepada para Dirjen lagi dan saya minta bahwa syarat teknis itu betul-betul dipersiapkan dan pola-pola kerja bersama yang terhormat Anggota DPR RI di lapangan itu betul-betul bisa dilaksanakan, karena sebetulnya buat Pemerintah ini juga hal yang sangat baik sebagai breging langsung kepada masyarakat. Jadi sebetulnya hal yang sangat positif dan Bapak, Ibu Dirjen sudah melaporkan kepada saya bahwa siap untuk pelaksanaannya dan telah memperhatikan.

Kemudian mohon izin, kami mohon untuk dapat melaporkan sebagaimana screen 8, untuk permohonan persetujuan Pagu anggaran Kementerian LHK pada tahun anggaran 2021, yaitu sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal dengan Pagu anggaran Rp546.509.240.000,00,-
2. Inspektorat Jenderal dengan Pagu anggaran Rp80.613.724.000,00,-
3. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan Pagu anggaran Rp342.275.694.000,00,-
4. Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung dengan Pagu anggaran Rp2.177.333.560.000,00,-
5. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan Pagu anggaran Rp1.925.381.253.000,00,-
6. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKPL) dengan Pagu anggaran Rp410.303.585.000,00,-
7. Badan Litbang dan Inovasi dengan Pagu anggaran Rp317.017.832.000,00,-
8. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Pagu anggaran Rp313.243.965.000,00,-
9. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) dengan Pagu anggaran Rp363.461.912.000,00,-

10. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Pagu Anggaran Rp344.665.771.000,00-
11. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim dengan Pagu anggaran Rp301.879.106.000,00-
12. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah dan Limbah beserta B3 dengan Pagu anggaran Rp271.968.331.000,00-
13. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan Pagu anggaran Rp249.465.285.000,00- dan
14. Badan Restorasi Gambut dengan Pagu anggaran Rp312.995.525.000,00-

Dan total Pagu anggaran dalam RKA K/L KLHK plus BRG senilai Rp 7.957.114.783.000,00-. Bapak Pimpinan, Kami mohon persetujuan dari yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI. Dan dalam konfigurasi sebagaimana yang kami laporkan.

Selanjutnya izinkan saya melaporkan berkaitan dengan sehubungan dengan catatan tadi dari yang terhormat Pak Ketua terkait dengan *Food Estate* di Sumatera Utara.

Bapak Ketua yang kami hormati.

Pada pidato Kenegaraan Bapak Presiden disebutkan tentang *Food Estate* untuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. Kami seperti yang kami laporkan yang lalu bahwa kita menyiapkan kajian lingkungan hidup strategis yang cepat, sehingga kita tahu persis sebetulnya arahnya harusnya seperti apa, yaitu penyediaan lahan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan bahkan sedapat-dapatnya sekaligus merupakan upaya dalam pemulihan lingkungan.

Terkait dengan Sumatera Utara kita telah mempelajari Pak Ketua, dari 30 ribu yang diusulkan itu ternyata yang memungkinkan apabila dengan pendekatan yang diminta oleh Bupati Humbang Hasundutan, maka biaya hanya layak kira-kira 19 ribu, karena wilayah-wilayah lainnya adalah kawasan hutan lindung yang punya fungsi sebagai catchment area daerah tampung Air untuk Danau Toba.

Kementerian LHK kemudian melihat hal lain Pak Ketua, karena bunyinya *Food Estate* bukan hanya untuk satu jenis tanaman tetapi juga untuk jenis-jenis tanaman pangan dataran tinggi, karena arealnya sangat bagus saya lihat. Di dataran tinggi bergelombang kemudian ada yang bagian tajam yang sudah merupakan hutan, tapi ada plato. Jadi di daerah tinggi tapi flat, jadi memang daerah yang sangat baik. Tapi kami melihat bahwa ternyata itu tidak cukup hanya di Humbang Hasundutan Pak Ketua. Oleh karena itu, dalam analisis singkat kami dan saya masih menugaskan staf ke lapangan karena dalam waktu satu bulan juga sejak tanggal 15 September yang lalu Pak Ketua, juga menanyakan kami mempersiapkan informasi bagi pengambilan keputusan yang tepat bagi Pak Menko Maritim maupun bagi Bapak Presiden.

Nah, oleh karena itu dalam analisis singkat kami *Food Estate* di Sumatera Utara itu harus bersama-sama dengan kabupaten yang lain juga Pak Ketua. Jadi harus ada Tapanuli Utara dalam catatan ini kira-kira 16.800 hektar Pak Ketua. Kemudian dari Tapanuli Tengah harus kira-kira 12.655 hektar dan juga dari kabupaten Pakpak Barat, yaitu pada areal-areal kawasan hutan produksi yang sudah tidak berfungsi hutan atau yang yang bisa dikonversi dan lain sebagainya.

Nah, pendekatannya betul-betul harus dalam pola 1 sista, jadi ada *scientific center excellent* dan sebaaginya. Oleh karena itu Bapak Ketua dan Ibu, Bapak Pimpinan, dan Anggota yang kami hormati, bahwa maksud dari yang terhormat Bapak Presiden terhadap *Food Estate* ini sebetulnya sangat baik bisa kita pahami. Dan kami menyadari betul bahwa tugas KLHK-lah kalau boleh ini ada gambarnya mungkin sepintas sebelum saya melaporkan nanti lengkap dalam dokumen ini yang di screen yang ini, biar Pak Ketua dan Bapak dan Ibu Anggota dan Pimpinan juga bisa ada bayangan.

Oleh karena itu, di sana nanti akan ada kita tetap menjaga yang hutan adat kayak Pak Duma Hansi Pitu Huta, hutan adat tetap dijaga sebagai hutan adat. Yang mau jadi KHDTK apa namanya di kawasan hutan untuk tujuan Litbang dan pendidikan itu juga tetap dijaga. Kemudian Kebun Raya, hutan lindungnya tetap dijaga, jadi disana kelihatannya kawasan konservasinya nggak banyak. Kemudian wilayah jelajah satuannya juga tidak di sebelah situ yang terdapat Pak Darori, jadi lebih banyak di bagian selatannya. Jadi oleh karena itu, *overview* sebelum kami melaporkan nanti yang lengkap kepada Komisi IV DPR RI sebagaimana catatan kami yang lalu dalam waktu 1 bulan sejak tanggal 15 nanti, kira-kira gambarnya seperti itu. Belum dapat ya?

KETUA RAPAT:

Tidak apa-apa, jadi Ibu Menteri saya dapatkan info lokasi yang diajukan oleh Bupati Humbang itu kurang lebih sebelah sini, tetapi yang bisa digunakan untuk wilayah sebelah sini. Saya rasa kalau 19 ribu di atas 900 sampai 1000 dari permukaan laut, kira-kira bahaya nggak karena dia kemarin bicaranya Kementerian Pertanian hanya bicaranya *Food Estate* khusus bawang putih, bawang merah, kentang. Ya sudah Ibu, tidak apa-apa tunjukin saja Ibu, saya bisa lihat.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Pak Ketua, tadinya yang diminta oleh Bupati Humbang Hasundutan adalah yang atas garis-garis arsir dengan garis tebal merah itu ke arah kanan Pak Ketua. Dan yang sedang di trial yang sedang dijadikan trail oleh Menteri Pertanian, coba ke hutan lindung yang kanan ya di situ terus ke kiri lagi yang garis lurusya, ya di situ turun sedikit di daerah-daerah situ sudah ada *exercise* dan ini menurut kami harus menjadi *center of excellent*, tetapi yang terhormat Pak Ketua sangat paham bahwa jangan dia dijadikan hanya Litbang konvensionalnya pertanian, tetapi dia harus

menjadi *center of excellent* ataupun percontohan yang baik untuk manajemen secara keseluruhan. Jadi ada istilahnya kalau di dalam *land use* dan penerapannya itu ada *culti fusion requirement*, jadi ada penelitian *culti fashion*-nya tanaman apa, jenis apa dan sebagainya, lalu ada manajemen requirement-nya. Jadi yang paling pantas kalau pola seperti ini misalnya apakah mekanisasi atautkah pakai sistem tenaga manusia, bagaimana pemupukannya, bagaimana teknologinya, bagaimana *accessibility*-nya, bagaimana pemasarannya, misalnya seperti itu termasuk lalu *conservation requirements*. Jadi yang disebut *center of excellent* yang kita minta kepada Pertanian, saya juga meminta Pak Ketua kepada Menteri Pertanian. Jadi jangan konvensional, pakai pola-pola hanya Litbang nelitinya tanaman apa, buat apa, hasilnya berapa, jadi jangan hanya segitu, tetapi sampai kepada *conservation requirements*-nya teraseringnya bagaimana, menata airnya bagaimana, system....

KETUA RAPAT:

Saya rasa Ibu Menteri, kalau bicara tadi Ibu katakana minta data kae Litbang saya Jamin pasti enggak ada, saya jamin pasti enggak ada. Karena Litbang itu ngurusnya oh pengembangan bunga krisan sekian-sekian cuman 5 hektar. Saya juga waktu itu minta sama Litbang “sudah lo jangan pusing-pusing ono-ini, ono-ini, fokus saja bikin bibit dan benih jagung sama padi”, ini kan kita masih beli, belinya ratusan miliar mungkin satu triliun, kenapa tidak itu saja. Jadi benar ya Ibu, yang saya katakan tadi semula diminta yang agak atas, karena kan tidak memungkinkan karena lerengnya terlalu tinggi dan kelongsorannya sangat labil diatas 1000 ini. Seharusnya kemarin Kementerian Pertanian menjelaskan *Food Estate* titik, tidak usah bicara bawang merah, bawang putih, kentang. Saya paham misalnya dataran tinggi cocok untuk bawang putih oke, untuk kentang oke, tapikan yang bawah ya tanam jagung, tanam porang, tanam singkong ya silakan, tetapi kemarin judulnya itu cuman 3 item dari Kementerian Pertanian. Saya langsung ngecek orang saya disana Ibu, dia bilang “ini tidak mungkin Pak, ini sudah turun kesini Pak”, maka tadi saya katakan disini tidak mungkin diturunkan ke bawah sini. Jadi ya memang saya terlalu cepat juga minta ini karena dari Kementerian Pertanian juga ngotot mau secepat mungkin, tadi seharusnya Ibu memberikan laporannya sebulan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Nanti akan kami lengkapi Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Nanti tolong dilengkapi secara titik koordinat, biar nanti orang saya yang di sana bisa mengecek ulang, apakah sesuai atau tidak. Saya bukan mencari kesalahan tetapi saya maunya jangan sampai, jangan sampai gara-gara tanam kentang longsor yang nggak bener siapa? itu Kementerian Kehutanan kayunya di tebang di sana, pasti itu Ibu. Tapi waktu ngotot bikin ini enggak ada yang ngalah.

Ya, silakan lanjutkan Ibu.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih Pak Ketua.

Jadi ini gambaran *overview*-nya sementara kami masih mendalami dan kita akan dapat studi strategi yang cepat sampai dengan tanggal 15 sejak tanggal 15 September kemarin. Jadi tadi yang punya Pertanian yang sudah dia lakukan nggak kelihatan Bapak Sekjen. Apa yang penting dari sini adalah bahwa secara lingkungan dia harus tidak boleh terjadi penurunan. Jadi memang areal-areal yang kita proyeksikan itu yang sudah fungsi hutannya sudah menurun, tetapi tentu saja nanti di dalam praktek-praktek pertaniannya harus agroforestry, harus ada requirement dari konservasi tadi seperti yang kami sampaikan.

Dan yang penting lagi sebetulnya Pak Ketua, karena dia kalau dilihat sistem landscape-nya maka memang nggak bisa meninggalkan Pakpak Barat, tidak bisa juga di bagian selatannya yang disebut Tapanuli Utara maupun Tapanuli Tengah. Oleh karena itu, dia akhirnya menjadi lebih tepat bernama food estate Sumatera Utara. Demikian Pak Ketua, jadi itu laporan kami terima kasih kurang lebihnya mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Itu yang paling benar tidak boleh mengklaim hanya satu kabupaten, orang bupatinya teman saya kok, saya tanya dia.

Terima kasih atas penjelasan yang telah di sampaikan. Selanjutnya kami persilahkan Anggota Komisi IV DPR RI untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya. Saran saya kepada Anggota hari ini kita bahas anggaran bukan bahas Dapil, kalau Dapil kan sudah jelas ya kan tadi Ibu Menteri juga sudah menyampaikan untuk KBR dari 2.500 itu dinaikkan menjadi 5000 per batang, ya Bapak Sekjen benar kan, jadi dari 50 juta menjadi 100 juta. Insya Allah kalau sudah harganya naik jangan sampai bibitnya juga tetap seperti yang lama jelek. Jadi nggak ada istilah kekurangan ongkos, kekurangan apa.

Silakan Pak Hasan apa Pak Budi, Pak Budi silakan.

KETUA RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDODO):

Terima kasih Bapak Ketua.

Kesempatan pertama kami berikan kepada Bapak Handi Lema, untuk berikutnya bersiap-siap Bapak Johan Rosihan.

Silakan Bapak Hansi.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.

Pimpinan yang terhormat,
Ibu Menteri, Pak Sekjen dan jajaran Eselon I, juga Direktur BRG.

Terima kasih.

Yang pertama saya happy Ibu, tidak seperti yang lain-lain tampaknya hari ini hanya ada penambahan 8 halaman, berarti tidak ada anggaran siluman. Jadi yang masuk ini yang kita bahas adalah yang sudah melalui Rapat Kerja sebelumnya dan juga Rapat Dengar Pendapat sebelumnya.

Yang kedua, terkait postur anggaran Bu, saya ingin bertanya apa sebenarnya kegiatan prioritas di dua Direktorat Jenderal dalam hal ini DASHL dan KSDAE sehingga kemudian anggaran di dua Ditjen ini, itu ada di angka Rp2,1 triliun dan Rp1,9 triliun, saya ingin tahu program paling prioritas di dua Ditjen apa. Karena kalau saya lihat gap-nya itu cukup jauh Bu, marginnya itu ada di angka sekitar Rp1,3 triliun dan Rp1,8 triliun. Di bawah Direktorat Jenderal ini anggaran yang terbesar itu adalah di Kesekjenan Rp546 miliar. Kalau jawabannya urgency prioritas pertanyaan saya, saya kasih contoh saja Bu, apakah Ditjen PSLB3 yang Rp271 miliar itu tidak penting. Hari ini kita berperang melawan sampah dan juga sampah limbah B3 atau mungkin Dirjen Perubahan Iklim Rp301 miliar, laju deforestasinya juga dahsyat di kita ini. Saya ingin mendapatkan gambaran sebenarnya apa alasan substantive dibalik jarak margin yang sangat besar ini Ibu. Saya kira itu pertanyaan saya terkait dengan anggaran ini.

Yang kedua, soal alokasi aspirasi masyarakat tadi ya kalau tidak salah KBR (Kebon Bibit Rakyat). Secara prinsip saya setuju saja tapi usulan konkrit saya kalau boleh kualitasnya dinaikin, kuantitasnya ya kita turunkin tidak masalah, sehingga anggarannya masuk Bu. Pak Budi, Pak Hasan, mohon izin kita bicara Indonesia ini kan juga ada Dapil, saya harus cerita ini ada kasus kemarin Kompas punya liputan khusus soal kebakaran lahan hutan di NTT itu di Wanggameti tolong Bu disikapi, itu satu. Dan yang kedua, ada kasus limbah batubara PLTU Ropa di Kabupaten Ende Bu, itu mencemari ekosistem laut, lahan perkebunan, ancam peternak dan juga jambu mente. Jarak PLTU itu hanya 50 meter ke bibir pantai. Saya dapat informasi kemarin bahkan dari KKP itu pernah turun ke sana mandi di pantai situ terus pulangnyanya badannya gatal-gatal Bu. Nah, ini mungkin KLHK perlu meninjau ulang AMDAL PLTU Ropa.

Ini yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan sekian dan terima kasih Pak Budi, Pak Kyai Hasan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Ansi.

Berikut kami persilakan Pak Johan Rosihan, untuk selanjutnya untuk bersiap-siap.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan yang saya hormati serta seluruh Anggota, Ibu Menteri, Pak Sekjen dan seluruh jajaran Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup.

Yang pertama, saya ingin menyoroti tentang slide yang disampaikan oleh Bu Menteri tadi terkait dengan realisasi anggaran. Kita sudah sepakat sejak awal bahwa kita harus saling jujur di sini biar kita tahu apa persoalannya. Kementerian Lingkungan Hidup ini capaiannya kan masih di bawah 60%, kecuali Ditjen PPI dan PHLKH yang mencapai 62. Pertanyaan saya Ibu Menteri, kenapa ini bisa terjadi apakah karena kita yang tidak bisa mengelola anggaran atau memang anggarannya yang tidak ada, kan bisa saja misalnya sudah kita programkan ternyata kucurang dari bendahara negara kita tidak punya, itu juga mungkin bisa menjadi itu. Coba kita di ceritakan apa masalahnya ini ya, apakah karena manajemen kita yang tidak bagus dalam pengolahan anggaran atau memang uangnya tidak ada.

Yang berikutnya soal penyesuaian Pagu anggaran. Kita ternyata sangat bisa merelokasi anggaran ini ketika kita memiliki sebuah kegiatan yang mungkin tidak terencana tapi menjadi kewajiban kita, karena kita menjadi tuan rumah dari *Minamata Convention* ini. Habis itu kemudian kita mengalihkan anggaran 30 dari Sekjen ada penambahan Rp35 miliar untuk kegiatan ini, dari Irjen ada penambahan Rp10 miliar, artinya akan ada pengurangan anggaran Irjen di situ, padahal konsen dari Pimpinan dan Anggota kemarin itu adalah anggaran Irjen itu kita tingkatkan jangan dikurangi. Tetapi dia bisa kita kurangi untuk menambah kegiatan yang *Minamata Convention* itu. Ada juga penambahan dari Dirjen PLSB3 sebesar Rp25 miliar, dan juga ada penambahan dari Dirjen-Dirjen yang lain. Coba diceritakan kepada kita Bu Menteri, urgensi kegiatan ini dan kenapa kita kok gampang sekali merubah. Nah, kenapa perubahan ini tidak kita arahkan kepada kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat hutan misalnya seperti itu.

Yang ang berikutnya saya mengapresiasi Bu Menteri telah memberikan kita sebuah informasi dan saya pikir ini bisa menjadi data kita Pimpinan, dari 30 ribu hektar di *Food Estate* itu ternyata yang bisa digarap cuma 19 ribu. Nah, ini bukan hanya berpengaruh kepada Kementerian Lingkungan Hidup tapi akan berpengaruh juga kepada mitra-mitra kita terutama mitra kita di Kementerian Pertanian, karena dalam acuannya dia

adalah anggaran dengan dengan hektarnya 30 ribu. Jadi mungkin ini bisa ada penyesuaian lagi nanti.

Terakhir Bu Menteri, ini bukan soal Dapil. Saya Pam Pimpinan Mas Budi, izinkan saya nanti pada saatnya memberikan kepada Ibu Menteri Bu ini ada sebuah dokumen dengan judul "Warga masyarakat Desa Oi Katupa menggugat". Izinkan saya nanti menyerahkan Pak Pimpinan, mereka menggugat karena mereka terusir dari desanya. Ini ada mereka PT Sanggar Agro Karya Persada ketika Rapat Kerja pertama dulu saya pernah mengangkat kasus ini Bu Menteri. Setelah saya mengatakan kasus ini banyak sekali pihak-pihak yang berkomunikasi dengan saya. Mereka ingin menceritakan sebenarnya menurut versi mereka tetapi faktanya masyarakat itu menggugat bahwa lahan mete mereka kemudian digusur untuk melihat digantikan dengan pabrik kayu putih dengan judul pabrik kayu putih terbesar dunia, saya juga belum pernah lihat benar apa tidak. Tetapi untuk apa kita punya yang begitu-begitu gagah ketika masyarakat kita itu terusir dari desanya dan merasa terganggu. Ada investasi Rp1 triliun, ada investasi segini-segini tapi masyarakatnya kita itu. Padahal tujuan kita dibentuk Pemerintahan ini adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Dan salah satu tumpah darah kita itu ada di Desa Oi Katupa itu. Tolong Bu Menteri nanti setelah mempelajari dokumen gugatan dari masyarakat Oi Katupa ini hadirkan keadilan, hadirkan Pancasila di apa namanya di Oi Katupa ini, sehingga masyarakat kita itu bisa meningkatkan kesejahteraan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Johan.

Ibu Menteri mungkin nanti bisa dijelaskan pertanyaan Pak Johan terkait penyerapan anggaran, mungkin ini ada beberapa catatan juga dari Anggota-Anggota yang lain secara teknis mungkin dijelaskan perdirjen nanti Ibu ya. Yang saya tahu mungkin memang beberapa Direktorat Jenderal Pak Johan, memang ada secara teknis itu mereka menunggu sampai bulan-bulan tertentu baru penyerapannya naik sekali. Contohnya PDASHL kalau tidak salah secara teknis dia harus menunggu sampai bibitnya tumbuh dulu baru dia beli nanti tanam. Tapi mungkin nanti Ibu Menteri bisa menjelaskan lagi Ditjen-Ditjen yang lain. Terima kasih Bapak Johan.

Berikutnya kami persilakan Ibu Luluk Nurhamidah.

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Terima kasih Pimpinan.

Ibu Menteri, Bapak Irjen dan Bapak Dirjen, Bapak dan Ibu semuanya yang saya hormati.

Yang pertama, saya ingin menyoroti terkait dengan progres realisasi anggaran di mana di sini anggaran dari Ditjen PPKL itu hanya 23,33%, kemudian juga BRG 35,86% dan seterusnya. jadi berurut dari bawah. Sementara saya mencatat bahwa berdasarkan laporan juga Kementerian LHK dari Januari 2019 saja ada Karhutla ya kalau tidak salah itu 857.756 hektar dengan rincian lahan mineral itu 630.451 hektar dan yang lahan gambut yang mengalami Karhutla itu 227.304 hektar. Sementara lahan terbakar yang paling luas itu ada di Kalteng, yaitu 134.227 hektar lalu disusul oleh provinsi yang lain. Pertanyaan saya Ibu Menteri dan Pak Dirjen yang terkait mengapa anggaran dari Ditjen PPKL ini, yaitu pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan justru paling kecil, padahal di Direktorat ini ada Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut itu antara lain yang kegiatannya justru untuk pemulihan ekosistem gambut. Nah, yang kita tanyakan apa saja yang kemudian dilakukan selama pasca Karhutla itu, kok kemudian serapannya masih di sini. Apakah memang enggak butuh anggaran untuk bisa menangani kerusakan dan juga Karhutla yang jumlahnya hampir 858.000 hektar ini. Atau tadi seperti pertanyaan rekan yang sebelumnya atau bahkan Pimpinan ini anggarannya apakah enggak ada.

Nah, kalau kemudian ternyata anggarannya sebenarnya ada tapi enggak di butuhkan ya apa kemudian perlu untuk di pertahankan anggaran itu ya. Tetapi yang paling penting pertanyaan saya justru kendalanya apa, sehingga penyerapannya sangat rendah sementara tugasnya sebenarnya itu sangat penting, yaitu untuk pemulihan ekosistem gambut termasuk juga BRG yang anggarannya serapannya hanya 35%. Saya tidak ingin bahwa covid ini menjadi salah satu alasan dari serapan yang sangat rendah, karena kejadian Karhutla itu sebenarnya jauh sebelum covid. Nah, seharusnya proses-proses dan kerja-kerja pemulihan itu kan di lakukan sebelum covid sampai kemudian hari ini.

Yang kedua tadi sudah disampaikan juga yang terkait dengan food estate, saya masih konsen yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi yang kita harapkan apakah memang sudah ada kajian yang komprehensif, yang sudah dihasilkan oleh Kementerian LHK dan itu sudah disampaikan ke Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian dan kira-kira seandainya diberikan kata di-highlighta gitu ya Bu ya. Rekomendasi yang paling mungkin apakah ini di lanjutkan atau tidak di lanjutkan. Kalau di lanjutkan itu harus di lanjutkan dengan syarat seperti apa, dan kalau tidak di lanjutkan jelas karena memang pertimbangan-pertimbangan melalui kajian yang tadi di sampaikan harus memenuhi berbagai requirement yang sangat ketat itu. Dan apakah Pemerintah sudah memenuhi unsur-unsur persyaratan yang di ajukan oleh Kementerian LHK.

Nah, kemudian yang berikutnya yang terkait dengan adanya gagasan ini dari masyarakat sipil Ibu, kemarin Kebetulan juga saya diundang dan dimintain tanggapan yang terkait dengan ecological fiscal transfer, yaitu transfer anggaran ke daerah yang berbasis ekologi yang menurut teman-teman ini mohon maaf Ibu Menteri, katanya Kementerian

LHK ini tidak cukup terbuka yang terkait dengan transfer anggaran daerah berbasis ekologi, ini kenapa kok bisa dianggap tidak terlalu terbuka sementara Kementerian Keuangan justru membuka opsi seperti ini. Yang ingin kita tanyakan sebenarnya insentif atau reward ke daerah yang berbasis ekologi itu yang sebenarnya sangat kita butuhkan. Nah, kalau ada insentif apakah juga ada di insentif, padahal daerah-daerah yang nyata-nyata tidak bekerja untuk pemulihan ekosistem, untuk menjaga hutan, untuk juga kondisi pencemaran lingkungan, apakah kemudian daerah atau provinsi atau kabupaten masih layak untuk mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar dibandingkan daerah-daerah yang ternyata nyata-nyata dianggap bisa menjaga lingkungan lebih baik. Dulu mungkin dalam Raker ini pernah saya sampaikan apa sih reward kepada daerah-daerah yang bisa menjaga daerah aliran sungainya lebih baik dibandingkan daerah-daerah rawan sungainya yang buruk. Kayal DAS Brantas yang di Bengawan Solo Bapak, itu kondisinya duluan yang sangat bagus. Justru yang kita pertanyakan intervensi apa dan reward apa untuk DAS Bengawan Solo terutama untuk masyarakat dan komunitas yang sebenarnya punya kontribusi untuk menjaga agar seluruh daerah aliran sungai ini masih dianggap sangat layak untuk bahkan manusia dan juga lingkungan.

Saya kira itu saya mengapresiasi sekali lagi karena anggaran untuk KBR sudah dinaikkan dari 50 juta ke 100 juta. Saya kira ini cara kita memanusiaikan petani-petani kita di sekitar hutan.

Terima kasih Ibu, Pimpinan.

*Walahu Muwafiq Ila Aqwamith Thariq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Terima kasih Ibu Luluk.

Berikut Pak Darori, kami persilakan.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Terima kasih Pak Ketua.

Teman-teman Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati,
Ibu Menteri, para Pejabat Eselon I.

Setelah membaca apa yang Ibu sampaikan tadi, pertama saya mendorong ini Ibu ya, karena tadi realisasinya 2020 masih kecil. Saya minta Bu Irjen sama Biro Perencanaan itu mengevaluasi ini apa yang kira-kira ini hambatannya, kalau memang betul belum dilakukan pembayaran karena kontrak dan sebaaginya nggak apa-apa. Jangan sampai nanti ini

tinggal 3 bulan tahu-tahu bulan terakhir enggak digunakan sudah di Kehutanan itu anggarannya kecil dibandingkan Pertanian totalnya Rp21 triliun sampai semua Eselon I beli ayam Ibu, Litbangnya beli ayam, Karantinanya beli ayam, jadi karena bingung. Sedangkan kita itu Kehutanan kekurangan banyak kalau bicara lahan kritis inilah yang perlu mungkin diangkat ke depan gitu.

Yang kedua Bu, saya minta juga setelah saya pelajari itu kemarin kami kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah agak banyak Polhut minta foto sama saya, tapi pakai sepatunya sudah nggak karuan Bu, kancingnya saya tanya “ini baju kayak gini dari mana?”, “ini zaman Bapak”, katanya, zaman saya sudah 10 tahun. Saya tahu KLHK sudah mengadakan tapi masih parsial, tolonglah ini bikinlah 20 ribu kali Rp500.000 itu Rp10 miliar Pak Sekjen, gagah loh jemput Sekjen di bandara sepatunya macam-macam, jemput Wamen kayak gini, Wamen senyum-senyum, ya sudah nanti laporkan. Rp10 miliar sudah cukup Ibu, ini tolong ya mungkin dari anggaran mana apakah dari perjalanannya di Gakkum, karean Gakkum ke depan sudah ringan karena kita akan melakukan tindakan itu nggak pidana administrasi jadi sudah lebih lebih ringan Pak, tidak kayak sekarang stress terus sekarang nanti agak ringan, mudah-mudahan pembahasannya akan jalan gitu.

Terus selanjutnya juga ini Bu Vivin, ya inikan mengukur alat pengukur kualitas udara, air, tanah ini kan dari pusat ya kalau gak salah ya, ya Pak Harli ini tolong ini ada laporan sebaiknya di masukkan ke DAK saja dari dana Ibu yang kecil itu dialihkan untuk kegiatan IPAL dan lain-lain gitu. Nah, selanjutnya ini yang saya sampaikan tadi soal food estate Bapak Ketua, saya ini di Humbang Hasundutan itu Kepala Dinas Kabupaten tahun 1983 sudah 4 tahun Pak, jadi di sana ada 5 Kecamatan Siborong-borong, Dolok Sanggul, Muara, dan Palilitan dan marganya pun saya hafal Hutasoit, Siregar, Manalu Purba, Simamora, karena saya lama disana Pak, walaupun sudah meninggalkan sana. Jadi gini, saya ingin jangan sampai di era terakhir periode Pak Jokowi gara-gara ini gagal Ibu. Kenapa? Karena lokasi di sana memang daerahnya dingin, tapi tanahnya sudah terbagi habis. Pertama, dimiliki oleh Indo Rayon, kawasan hutan semua, di luar itu tanah marga. Memang di sana daerah sayuran Ibu, jadi kalau saya lihat tadi 19 ribu masih kebanyakan di Humbang, karena saya 4 tahun disitu, jadi paham betul lah. Tolong ini dievaluasi dan kalau perlu saya membantulah jangan sampai nanti Sumatera Utara tahu-tahu, kalau Bupati kan biasa kalau perlu tidak 30 ribu, 50 ribu mau tapi yang bingung kan kita, dimana diambil. Dan itu catchment-nya Danau Toba Ibu, catchment area Danau Toba. Ini tolong juga karena Menteri Pertanian yakini tahun ini dilaksanakan dari mana itu ya, ini tolong ya.

Yang kedua, di Kalimantan Tengah ini yang 160 ribu sama yang 30 ribu beda tidak arealnya Ibu, kalau ini di daerah gambut pengalaman saya, saya dulu anggota tim waktu SBY, ini gagal Ibu. Sawahnya panen tapi ongkosnya lebih besar dari pada harga padinya. Nah, ini pengalaman ini tolonglah karena gambut itu asamnya tinggi ya, air susah ya, terus tenaga kerja susah, tanahnya nggak subur. Jangan sampai nanti gagal ya, saya

nggak mau periode terakhir ini jadi beban permasalahan karena tidak tahu. Walaupun Bapak Luhut ini orang Tapanuli tapi saya yakin tidak paham karena dia besar di Jawa, kecil saja di sana Ibu. Beda dengan saya, saya kecil di Jawa tapi besar 22 tahun di Sumatera Utara, kebalik itu. Jadi saya memberikan masukan ini biar clear lah, karena Menteri Pertanian mengatakan di Komisi IV DPR RI tahun ini yang 30 ribu di Kalteng akan dilaksanakan, di mana ini Pak Ketua, ini tolong jangan sampai menyenangkan tapi beban dari pada instansi lain gitu.

Saya kira itu Pak Ketua, jadi yang terakhir juga ini Pak Sekjen nanti kan kita bicara mengenai sanksi ya, ini mestinya kan kita sudah ngomong sanksi administrasi itu kan diatur di Undang-Undang 30 Tahun 2014 mengenai sanksi administrasi itu ada 3, ringan, sedang, berat, tapi yang dikirim ke kita dari sanksi Pemerintah itu masih yang nyusun ini siapa kok nggak ngerti gitu, kan kalau Pak Sekjen sudah tahu lah ini. Ini kok aneh gitu, memerinci sanksi administrasi ada 10, mestinya dibagikan yang ringan apa, yang sedang pelanggarannya apa, yang berat apa gitu. Jadi nanti waktu kita ketemu di sana jadi kita nggak dialog dengan Pak Sekjen, langsung Pak Sekjen ekspose itu, jadi saya nggak ngomong lagi gitu.

Terima kasih Ketua,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Darori.
Berikut kami persilakan Bapak Suhardi Duka.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Ibu Menteri, Pak Sekjen dan para Eselon I, Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat yang saya hormati.

Sudah banyak yang di sampaikan teman-teman. Yang pertama, saya kira sama anggaran tahun 2020 49,23% lagi 4 bulan saya kira perlu dipacu, sehingga manfaatnya bisa realisasi. Saya kira kita dihadapkan pada kepentingan ekonomi dan daya dukung lingkungan, baik kehutanan lingkungan perkotaan termasuk sampah. Alokasi anggaran yang tidak besar tahun 2021 menjadi tantangan tersendiri bagi KLHK untuk merencanakan dengan bijak dan fokus. Di lain sisi pemanfaatan hutan sosial kawasan hutan juga menjadi harapan masyarakat di sekitar hutan, termasuk tentunya dengan desa wisata yang saat ini diminati masyarakat dan UMKM. Untuk itu, saran pendapat saya juga adalah penanganan hutan mangrove tahun ini dibiayai oleh 2 Kementerian, KLHK dengan KKP. Tapi kita tidak fokus untuk menjaga hutan mangrove ini, justru tereksplorasi menjadi jalan tol, bahkan SPBU, rumah makan, empang dan

lain-lain. Saya kira walaupun kita biayai terus tapi tidak dijaga saya kira hutan mangrove kita juga akan habis.

Yang kedua penanganan sampah perkotaan dan sampah B3, saya kira juga saya harap menjadi prioritas dalam 2021 ini. Taman Nasional Ganda Dewata ini adalah kawasan yang masih perawan di Sulawesi, ini mendapat perhatian kalau memungkinkan KLHK bisa buat Satker tersendiri yang saat ini Satkernya melekat di Sulawesi Selatan. Terkait dengan food estate, saya kira kalau kita bicara tatkala pangan itu adalah Padat Karya, walaupun mekanisasi tetap butuh manusia yang mengerjakan yang banyak-banyak. Oleh karenanya itu bila wilayahnya jauh dari pemukiman ini juga menjadi persoalan tersendiri. Kedua, harga pangan itu sangat rentan dengan menjaga inflasi. Oleh karena itu, bila infrastrukturnya tidak tersedia jauh dari konsumen, maka juga tidak ekonomis untuk apa namanya dari tinjauan ekonomi untuk pangan ini, sehingga itu memang apa yang menjadi rencana food estate ini saya juga agar menjadi perhatian supaya jangan sampai gagal sebagaimana perkiraan dari teman-teman yang ada di Komisi IV DPR RI.

Yang terakhir adalah saya setuju dengan alokasi anggaran yang diminta oleh Ibu Menteri untuk di tetapkan pada hari ini. Dan setelah itu saya minta supaya satuan 3 bisa dikirim ke Komisi IV DPR RI untuk menjadi fungsi pengawasan kami di Komisi IV DPR RI.

Demikian.

*Wallahu Muwafiq Ila Aqwamith Thariq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Suhardi Duka.

Berikut kami persilakan Bapak Haerudin.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang terhormat Pimpinan, Anggota, Ibu Menteri seluruh jajaran Eselon I, Bapak Wamen hadir tidak.

Ingin saya sampaikan beberapa hal Ibu Menteri, tentu yang pertama kita sikapi bahwa setiap Anggota punya kewajiban ngurus Dapilnya, karena itu sumpah jabatannya. Tidak ada siapa pun yang boleh melarang itu. Yang kedua, Ibu Menteri saya ingin tanya ini memang seragam putih ini seragam Kehutanan atau sudah ada peraturan Pemerintah harus putih wajib. Kan lebih bagus kita kalau Rapat Kerja ini seragamnya seragam Kehutanan, jelas identitas kita itu. Saya pikirannya lama sebetulnya, ini tidak substantive tapi paling tidak kita juga punya ruang university kita itu siapa sih.

Ibu Menteri, ingin kami sampaikan situasi hutan kita memang dalam situasi keterancaman. Semakin hari walaupun musimnya ini adalah wabah pandemic yang begitu hebat COVID ini, kerusakan hutan masih terjadi dimana-mana. Saya meyakini kalau Kementerian Kehutanan bubar diganti oleh kelompok adat di hutan-hutan itu akan jauh lebih aman hutan kita itu, saya yakin itu ketimbang ada Kementerian Kehutanan itu. Apalagi dengan anggaran yang segini sedikit, saya berharap Ibu Menteri anggaran yang terbatas ini mampu kita fokus. Saya juga berharap satu tahun Kementerian Kehutanan merilis bahwa hutan ini sudah menjadi hutan kembali. Kita bertambah hutan sekian hektar, ada rilis dari kehutanan itu. Tidak tahu seuzon itu tidak boleh, dosa dalam agama, tapi prediksi kita dalam ruang kehidupan kehutanan kita di birokrasi KLHK Ibu Menteri juga jauh lebih paham, putaran yang merongrong itu bukan hanya satu atau dua orang dan sejarahnya memang begitu.

Jadi kadang-kadang suatu saat Ibu Menteri bisa kecolongan, kenapa ada izin ini, izin itu, bisa jadi seperti itu, karena saya yakin Ibu Menteri juga terbatas untuk memahami semua hal di KLHL ini. Anggaran yang terbatas ini kita harap ke depan ada report bahwa hutan kita bertambah. Paling tidak reportnya adalah hutan kita ngerem per tahun deforestasinya, paling tidak ada itu yang kita ingin. Karena kenapa? Itu titik tolak ukur kesuksesan Kementerian KLHK ini. Kalau deforestasi terus tambah tidak ada kesuksesannya, mungkin suatu saat kita akan ajukan bakar saja KLHK itu ganti oleh kaum adat-kaum adat jaga hutan, mereka itu sampai tempur. Kenapa keyakinan saya sampai sepenuh itu, merek itu sampai struktur keyakinan terdalam spiritualitasnya urusan hutan itu, bukan berpikir urusan uang tapi sebuah sistem yang mereka anut di ruang-ruang kehidupan di kehutanan mereka itu, makanya itu lebih terjaga. Dalam Bahasa Sunda itu di hutan itu ada pamali, ada Bahasa wingit, hari ini tidak ada, wingit tidak ada, hutan itu sama-sama saja semua bisa habis dalam satu tahun.

Nah, inilah yang kita khawatirkan untuk di masa depan, karena kondisi hari ini hutan kita tetap berkurang. Seluruh potret hutan kita dari seluruh orang yang memperhatikan memang terus berkurang.

Yang kedua Ibu Menteri, ingin kami sampaikan juga bahwa kita ini memang berjuang di ruang-ruang pusat air itu. Kalau memang kita setuju PKSDAE kita itu punya ruang lebih luas, lebih banyak dari sisi anggaran, lebih strategis, karena memang pengamanan air itu jauh lebih utama. Aman hutan, aman air, aman kehidupan. Mudah-mudahan perjuangan Ibu Menteri, akan menjadi kebaikan yang berkah bagi bangsa, perjuangan mengamankan hutan bukan pekerjaan yang sederhana, berjuang menghadirkan pohon sebagai sedekah yang luar biasa juga tidak semudah yang kita katakan. Mungkin kita dari DPR RI yang bukan ahli di bidang hutan hanya mengawasi dan punya harapan karena kita mencintai hutan kita.

Terima kasih Ibu Menteri, terima kasih Pimpinan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Haerudin.

Ibu Menteri, catatan dari kami saja saya mempunyai mungkin konsen juga yang sama dengan Bapak Haerudin. Kami apresiasi kinerja KLHK selama 5 tahun-10 tahun terakhir terkait laju deforestasi dan juga pemulihan rehabilitasi lahan kita melihat laporannya cukup baik, tapi tentunya kita juga agak susah-susah untuk benar-benar mengawasi pemulihan kembali atau penanaman kembali hutan-hutan yang kritis. Mungkin ini juga ada hubungannya dengan SIPDAS, saya mau tahu sekarang perkembangannya sudah sampai di mana, semoga ke depan ada mekanisme, ada bantuan untuk kami bisa ikut melihat perkembangan penanaman rehabilitasi hutan itu seperti apa setiap tahunnya. Moga-moga mungkin saja ada informasi yang real time atau akurat itu mungkin kita ingin lihat ke depan Ibu Menteri.

Terima kasih Bapak Haerudin, berikut kami kasih kesempatan kepada Bapak Andi Akmal Pasludin.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,
Ibu Menteri, Bapak Sekjen, dan jajaran Eselon I yang saya hormati.

Saya sudah membaca bahan yang sudah ada Ibu Menteri, terima kasih sudah sangat detail dan kita paham ya dari sisi anggaran dan program. Karena itu, saya hanya memberikan beberap saran Ibu Menteri untuk ke depannya agar kita saling menguatkan. Yang pertama, kita masukannya Ibu Menteri untuk Humas sebenarnya, kami ingin kinerja dari KLHK yang sangat bagus ini bisa dilihat oleh masyarakat secara umum itu Pak. Dan juga sebenarnya juga menjadi edukasi bagi masyarakat. Jadi mungkin penguatan Humas-nya Ibu Menteri, ini sangat bagus saya kira dikuatkan.

Yang kedua, kalau kita melihat angka deforestasi Ibu Menteri, mengalami penurunan artinya kinerjanya kelihatan sebenarnya, kalau angkanya menurun berarti ada upaya-upaya untuk penanaman, ada upaya untuk penjagaan di dibandingkan angka perusakan, kebakaran maupun perambahan oleh perkebunan maupun tambang. Ada satu hal catatan kami Ibu Menteri di sini, untuk penjagaan sebenarnya kinerja Gakkum selama ini cukup bagus Ibu Menteri, cuman ke depannya kita berharap yang penjagaan ini kalau penanaman ini sudah naik Dirjen DAS ini sudah cukup anggarannya walaupun dirasa kurang tapi sudah naik. Khusus untuk penjagaan kita yang ke depannya Gakkum dan KSDAE ini perlu diperkuat, baik dari sisi anggaran maupun dari sisi sarana dan prasarana. Apalagi Gakkum sekarang mengurus lingkungan dan hutan, bukan hanya hutan tetapi lingkungan juga. Yang paling

masalah sekarang kita inikan lingkungan Ibu Menteri. Oleh karena itu, saya berharap sekali Gakkum ini diperkuat agar tampilannya berwibawa dan mereka punya operasional yang cukup. Saya kira ini ke depannya jadi catatan yang kritis untuk kita tambahkan.

Yang ketiga, untuk masalah karena kita di sinikan dulunya Komisi IV DPR RI Ibu Menteri hanya berbicara kehutanan, kami ini yang sudah 2 periode di sini belum begitu paham juga dengan lingkungan. Selama ini lingkungan ini hanya dengan Dirjen Sampah dan B3 yang kami ketahui seperti apa programnya. Nah, ke depannya ini 2021 mungkin Dirjen yang lain juga bisa kita komunikasi program-program yang bisa dibawa ke daerah, ke masyarakat sehingga keberadaan Dirjen Lingkungan Hidup ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat, apakah sosialisasi, apakah program edukasi bagi masyarakat dan lainnya. Saya kira ini harapan Ibu Menteri ke depannya, sehingga betul-betul kemitraan Komisi IV DPR RI ini kuat dengan Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, bukan hanya kehutanan saja.

Saya kira demikian Bapak Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Andi.

Berikutnya Ibu Nur'aeni.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan beserta teman-teman Anggota Komisi IV DPR RI, Ibu Menteri, Bapak Sekjen, beserta jajaran Eselon I yang saya hormati.

Mungkin dari saya beberapa masukan, saran serta mungkin pandangan. Yang pertama, kaitan dengan evaluasi anggaran 2020, ini saya sangat menyayangkan terhadap realisasi anggaran yang di laksanakan oleh Kementerian LHK, kurang lebih kira-kira 49% ya. Nah, hal ini mungkin menjadi pertanyaan kenapa sehingga tidak terlaksana dengan baik. Apakah memang dari sisi perencanaan yang kurang dipersiapkan secara matang ataukah dalam rencana dan pelaksanaan ini tidak matching. Sudah anggarannya sedikit hanya Rp7 triliun tetapi tidak mampu untuk menyerap, apalagi kalau berbicara untuk meningkatkan progress nanti ke depan di 2021. Saya mendukung sekali dengan adanya penambahan di beberapa Dirjen, tapi yang saya sanksikan apakah penambahan ini mampu untuk direalisasikan, sementara yang 2020 saja dari sekian Rp7 triliun ini serapannya masih

rendah, apa sih yang akan dilakukan ke depannya supaya Komisi IV DPR RI juga merasa yakin dengan tambahan item yang diusulkan. Itu yang pertama.

Yang kedua, dari beberapa Dirjen ataupun di Kementerian, misalkan Sekjen, Inspektorat Jenderal yang ada penambahan-penambahan tersebut. Ini apa yang akan dilakukan antara kegiatan Sekretariat Jenderal dengan PSB3 inikan ada tambahan masing-masing 35 miliar, 25 miliar untuk mendukung kegiatan tadi *Minamata Convention* tahun 2021. Ini apakah memang sama bentuk kegiatan dan program untuk mendukung upaya kesana itu seperti apa, apa yang akan didapatkan output dan outcome dari kegiatan tersebut. Di beberapa mungkin Ditjen saya mengevaluasi yang pertama di Ditjen PDASHL, PDASHL ini anggarannya kan dari beberapa Ditjen yang terbesar tapi dalam realisasi pelaksanaan juga termasuk rendah juga, akan tetapi di 2021 juga diusulkan peningkatan anggaran. Nah, ini seperti apa sih yang akan di usulkan kegiatannya. Sementara dari evaluasi 2020 kemarin, dari program KBR di daerah kami pun di Dapil ini masih ada menemui hambatan kaitan dari proses usulan-usulan yang banyak memakan mungkin birokrasi yang terlalu berbelit-belit. Nah, mohon ini juga ada di butuhkan suatu pemangkasan birokrasi sehingga masyarakat juga dalam pengajuannya cepat untuk bisa direalisasikan.

PSLB3 kalau dilihat dari sisi anggaran memang ada tambahan, tapi saya kira sangat kecil banyak sekali yang harus dilakukan oleh Dirjen PSLB3 salah satunya mungkin memberikan nilai edukasi, sosialisasi ke masyarakat apalagi terhadap sampah-sampah infeksius di masa-masa pandemic covid seperti ini. Ditjen PPKL ada tambahan Rp15 miliar, ini sangat setuju sekali ya akan tetapi ini saya belum mengetahui berapa unit IPAL yang akan di gulirkan nanti 2021 serta lokasinya dimana saja untuk tahun 2021. Teknis usulan programnya seperti apa untuk mendukung kearah sana. Ditjen PSKL ada tambahan kurang lebih Rp15 miliar, Bank Pesona ini sangat di butuhkan sekali di masyarakat kemarin pun dari beberapa program yang kami usulkan serta realisasikan hanya Ditjen PSKL yang luar biasa, saya memberikan apresiasi kepada Dirjen PSKL ternyata Bang Pesona direspon oleh masyarakat dan realisasinya tidak berbelit-belit, saya sangat mendukung untuk pengembangan ekonomi di wilayah perhutanan. Mungkin itu saja Bapak Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Nur'aeni.

Berikut kami persilakan Bapak Muslim dan yang terakhir dari ruang Komisi IV DPR RI.

F-PD (MUSLIM, SHI., M.M.):

Terima Kasih Bapak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Ketua dan rekan-rekan Anggota Komisi IV DPR RI,
Ibu Menteri, Bapak Sekjen beserta jajaran Kementerian LHK.

Pertama, tentu apa yang di sajikan oleh Ibu Menteri, saya terus terang dari awal kalau bicara secara materi ini sangat komprehensif Ibu Menteri. Artinya, secara menyeluruh kalau kita lihat kinerja dari Kementerian LHK ini reportnya sangat bagus. Yang kedua, berkaitan tadi mungkin yang di sampaikan Ibu Nur, saya sepakat persoalan realisasi anggaran. Mungkin Ibu Menteri bisa menjawab rata-rata baru 49,23%. Di sini yang paling rendah kita lihat inikan di PKL itu baru 23,33% dan kemudian diikuti oleh BRG juga sama 35%, kemudian yang berikutnya PDASHL ya ini saya pikir juga masih, ini kan mungkin grafiknya sudah jelas nih Pak Sekjen, ini tentu sebagian besar menyoroti masalah anggaran. Kalau bicara kinerja Kementerian LHK secara menyeluruh memang kita lihat nih luar biasa Ibu Menteri ya.

Kemudian berkaitan dengan penyesuaian Pagu anggaran Kementerian LHK. Kita tentu berharap apa yang telah dijalankan beberapa Dirjen kemarin, salah satu mungkin masalah sosialisasi dari pada limbah B3 Pak, ini ketika kita turun di beberapa di Aceh ada 2 titik itu Pak. Ini sangat diharapkan Ibu, bahkan hampir semua rumah sakit belum pernah ada seperti ini Ibu. Jadi begitu kita berikan hal seperti ini mereka sangat mengharapkan, apalagi kita berikan bantuan-bantuan, kenapa? karena sangat dibutuhkan. Harusnya memang Kementerian LHK ini didorong program semaksimal mungkin untuk ke daerah-daerah, karena mereka yang sangat membutuhkan ini. Ini mudah-mudahan tentu saja di sini ada penambahan anggaran juga sangat sedikit tdi ya sekitar Rp25 miliar, ini mungkin salah satu yang menjadi sorotan.

Yang kedua Ibu Menteri, kita terus terang beberapa kali kita sampaikan masalah Polisi Hutan. Ini berkaitan juga penanganan dalam berbagai pembalakan liar, segala macam. Ini perlu ada lobby-lobby khusus Ibu Menteri, saya melihat petugas dari Polisi Hutan inikan sangat kecil dan tidak nambah-nambah terus, sementara saya lihat ini mereka akan pension. Ini saya pikir ini beberapa kali masukan ini Pak Sekjen, terutama ini menjadi prioritas. Kenapa? kalau ini tidak dilakukan terus terang Pak, saya lihat di beberapa daerah ini di depan hutannya bagus, di tengah sudah dibalak terus. Kenapa? Karena tidak ada pengawasan. Saya sangat sepakat tadi bagaimana melibatkan juga keberadaan teman-teman Anggota Komisi IV DPR RI di Dapil masing-masing kita untuk mengawasi itu, tapi kalau nggak ada petugas bagaimana kita mengawasi.

Kemudian yang terakhir, ada telepon dari daerah Ibu Menteri berkaitan dengan kawasan ekosistem Leuser. Waktu itu mungkin kita sudah sampaikan ini sejauh mana yang kita harapkan waktu itu yang keberadaan di Sumatera Utara bisa dibawa ke Dapilnya Pak Salim Fakhry di sana, sehingga

masyarakat juga bisa lebih proaktif untuk mengawal dari pada keberadaan kawasan ekosistem Leuser. Mungkin itu beberapa hal Pak Ketua, itu Pak Salim Fakhry sudah ngangguk-ngangguk sebentar lagi calon Bupati Bu di Aceh Tenggara. Ini kita harapkan beliau pasti terpilih, Insya Allah.

Terakhir mungkin Pak Dirjen KSDAE ini, ini saya pikir perlu sekali lagi saya sampaikan, saya ingatkan kembali semangat dari beliau untuk masalah gajah di Aceh itu yang pada akhirnya kita harapkan jadi sebuah ekowisata di sana mohon dukungannya. Kenapa? karena di beberapa Bupati itu berharap banyak dukungan dari Pemerintah Pusat karena daerah memang sangat terbatas anggarannya. Ya mungkin Pak Wiratno bisa lagi kita akan kesana lagi Pak, karena sangat ditunggu oleh masyarakat. Kenapa? selama ini sudah di support kita harapkan terus didukung sehingga sisa maksimal dengan target yang kita harapkan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Pak salim Fakhry.

F-PG (H.M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Terima kasih Pak Ketua Budi.

Ibu Menteri yang kami hormati, Pak Sekjen dan jajarannya.

Saya Pak Pimpinan, tidak banyak lagi menyoroti ada beberapa hal cuman masalah kinerja dari Menteri KLHK. Saya kira terutama kemitraan antara kita dan kita sangat sangat luar biasa Pak Ketua. Betul Pak Ketua tadi Pak Sekjen dan Ibu Menteri sudah katakan Pak Muslim, masalah yang kita ajukan Insya Allah sudah sampai ke Menpan RB.

Yang kedua Pak Ketua, yang saya minta sama Kiki tenang dulu Kiki, perhatikan ke Pak Sekjen dan Ibu Menteri sana. Mbak, ini kita Pak Ketua santai Pak Ketua, ada beberapa yang perlu saya soroti nanti. Yang kedua ini yang saya minta sama Ibu Vivin nampaknya kabar burung Ibu, sudah di perjalanan, terima kasih Bu. Makanya saya tidak menyoroti kinerja, kalau kita menyalahi Kementerian di antara beberapa mitra kita ini, terus terang KLHK inilah yang paling sejuk dan paling aman. Ini fakta menyatakan Pak Suhardi Duka. Saya bukan memuji-muji antara Pimpinan dan Ibu Menteri dan jajarannya, mungkin karena kehadiran Pak Budi hari ini adem semua, kalau Pak Budi memimpin memang itu kelebihanannya. Kemarin kalau saya tidak salah kita sama Kementan ini hangat, kenapa sama KLHK pertanda Ibu bukan karena Ibu dari Lampung, Pak Sudin dari Lampung tidak. Ibu dan jajaran sangat memahami kondisi Komisi IV DPR RI. Cuman harapan kami

Bu, Pak Sekjen, apa-apa yang ada dia katakanlah untuk Dapil apa salahnya untuk dipercepat. Saya kira semua Anggota setuju ya Pak Hansi ya, Ibu kiki setuju kalau tidak saya lapor sama Bapak Sekjen.

Jadinya Pak Pimpinan ini sejuk betul, tidak pernah Pak Sudin hari ini mimpin rapat begitu dingin. Hampir 5 tahun saya sama Pak Sudin, hari ini entah apa saya pun tidak, berarti Ibu Menteri dan jajarannya dapat memahami bagaimana Pimpinan kami. Kami ini Bu ibarat pahat Bu, begitu dipukul Bu kami lebih kencang, kalau sudah aman Pimpinan kami Bu, Anggota juga merasakan tentram. Saya kira ini saja Bapak Ketua, betul kan? Belum tentu. Maksudnya gini mungkin Poksi Ibu yang belum menjelaskan, semua ini sudah ada maksudnya apa-apa yang kita inginkan sudah hampir terpenuhi, jujur saja. Yang kami inginkan bukan maksudnya kami minta sesuatu Pak Sekjen, ya Ibu Kiki ya, kita bukan minta sesuatu kepada Pak Sekjen, kita minta cuman ada program dilibatkan sebagai mitra, ini saja yang kami minta Ibu Menteri. Mungkin itu saja Pak Ketua, Pak Ketua khususnya Pak Sudin jangan selalu melihat kemari Pak Sudin, lihat juga ke kiri, lihat ke kanan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Salim Fakhry.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Waduh sudah diinterupsi, ada apa Mbak Kiki.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Boleh dong, kan hak saya juga memang Bang Salim doang.

KETUA RAPAT:

Kami persilakan untuk Ibu Kiki.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Sudah ditegur Pak Budi, Bang Salim lagi.

Ibu Menteri beserta jajaran.

Saya hanya mewakili aspirasi dari yang saya terima berminggu-minggu ini, saya mohon segera ditindak lanjuti masalah hutan harapan yang saya pernah saya sampaikan. Masalahnya mereka sekarang meminta audiensi tapi karena situasi sedang tidak memungkinkan hari ini dari pada nanti gimana-gimana juga mereka, kita juga merasa bersalah. Saya mohon Ibu dengan segala rasa hormat, terkait Hutan Harapan itu mungkin ada baiknya approach-nya dialog dulu kepada Kepala Daerah untuk menjelaskan kepada masyarakatnya kan begitu saja sebenarnya. Karena mereka sudah mengirimkan surat Pimpinan untuk audiensi ke Komisi IV DPR RI. Jadi supaya ada jalan tengahnya seperti apa ya kan, karena ini masyarakat yang meminta.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Kiki saya jawab, nanti kita cari waktu audiensi pakai virtual saja, segera minggu depan begitu ada waktu kosong, kita atur pakai virtual saja, supaya aspirasi mereka tersampaikan, kita semua juga tahu ya.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Terima kasih Pimpinan terbaik hati dan paling ganteng se-Indonesia Raya.

Kemudian saya sedikit menegaskan tadi saya di virtual sempat mendengar masalah apa namanya Humbang itulah namanya. Sekali lagi saya hanya meminta penegasan dari Menteri-Menteri teknis ini. Masalahnya saya mendapatkan surat juga bahwa sedang mau ada sosialisasi terkait *Food Estate* di Suamtera Selatan. Kalau bahasanya Mbak Luluk genjot Ketua, tapi maksudnya kalau saya yakin Ibu Menteri mungkin punya pemahaman yang sama bahwa dalam situasi seperti ini saya harapkan *step by step* bukan begitu Pak Ibu, karena situasinya kita harus mengeluarkan empati yang besar juga sama masyarakat. Kita bukannya secara prinsip okelah, akan tetapi *first thing first* mungkin kalau bahasanya ya kan.

Kemudian saya berharap kalau masalah Humbang Hasudutan itu kalau memang tadi saya sempat dengar terakhir kata Ibu Menteri, berapa 19 ribu ya Pak Sekjen ya, 19 ribu kan? Nah, kalau memang 19 ribu output-nya realistis nggak gitu, ya kan Pak ya. Walaupun sebenarnya itu memang bukan wilayah saya, tapi this is supported gitu loh untuk mau meng-cover masyarakat, itukan tujuan juga salah satunya kan gitu loh. Jadi maksudnya kalau bisa realistis. Itu saja, terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Mbak Kiki.

Berikut kami beri kesempatan kepada Ibu Maria.

F-PDIP (MARIA LESTARI, S.Pd.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI beserta anggota,

Yang saya hormati Ibu Menteri beserta jajaran.

Dalam hal penyesuaian Pagu anggaran Kementerian LHK 2021, program perhutanan sosial yang menjadi target pembukaan lapangan kerja baru. Pertama, saya menyoroti dalam Direktorat Jenderal PSKL, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kementerian Lingkungan yang menjadi mesin penggerak perhutanan sosial. Saya rasa program kerja ini sangat banyak sekali membantu masyarakat dan saya memberi harapan semoga mudah-mudahan KLHK bisa sangat membantu program kerja ini di masyarakat. Dan ini harus berkaitan dengan koridor Direktorat Jenderal lainnya.

Nah, salah satu program perhutanan sosial hutan tanaman rakyat perkembangannya belum terlalu mulus saya lihat. Nah, karena diperlukan bimbingan teknis lebih dalam untuk kelompok yang mendapatkannya. Nah, bukan hanya berhenti pada pola perhutanan sosial-nya saja, sehingga dapat mengukur peningkatan kesehatan masyarakat. Mungkin itu saja Ibu Menteri.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Maria.

Ibu Menteri, sedikit tambahan dari saya karena tadi ada beberapa masukan dari Anggota terkait rehabilitasi hutan dan juga segala upaya untuk menekan laju deforestasi. Kami memantau dan kami apresiasi, kami hormat Ibu Menteri baru-baru ini mendapat penghargaan juga dari dunia yang kesuksesan KLHK mendapatkan persetujuan pendanaan dari GCF sebesar 103 juta US Dolar untuk *result-based payment*. Tentunya ini mengundang banyak ketertarikan dari pihak-pihak calon-calon mitra yang ingin masuk juga membantu Indonesia dalam program rehabilitasi hutan ekosistem dan konservasi, termasuk juga perdagangan karbon. Yang ingin saya tanyakan dalam kesempatan ini adalah perkembangan peraturan-peraturan yang saya tangkap kalau tidak salah masih ada Perpres yang sudah disiapkan saya ingin tahu kelanjutannya seperti apa untuk mendukung usaha perdagangan karbon ini Ibu Menteri. Kami berharap dengan adanya regulasi ini tentunya dapat mengatur *result-based payment*, begitu juga mungkin dengan konsep seperti Performance Ibu Menteri. Moga-moga dengan regulasi-regulasi yang akan dihasilkan tentunya menunjang tujuan-tujuan kita termasuk emisi juga Ibu Menteri. Dan kami berharap ini bisa merangsang mitra-mitra, calon-calon mitra kerja apakah dari Indonesia, perusahaan swasta, dunia, yang ingin membantu menjaga melestarikan, merehabilitasi hutan ekosistem Indonesia yang ada.

Saya kira ini catatan tambahan dari saya, berikut kita persilakan ada beberapa penanya dari virtual. Yang pertama kami persilakan Ibu Endang Thohari. Ibu Endang ini ngomongnya tidak ada masalah penelitian ya Ibu, 2 menit Ibu Endang.

F-GERINDRA (Dr. Ir. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS., M.Sc.):

Terima kasih Pak Ketua.

Ibu Menteri yang saya hormati, Pak Sekjen, dan Dirjen.

KETUA RAPAT:

Tolong suaranya dibesarkan.

F-GERINDRA (Dr. Ir. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS., M.Sc.):

Terima kasih Bapak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kepada Ibu Menteri dan Bapak Dirjen, Bapak Sekjen yang saya banggakan, Bapak Ketua dan jajaran Komisi IV DPR RI yang saya banggakan juga.

Saya hanya ingin menanggapi dua hal Pak, yaitu Ibu Menteri tadi menyantumkan anggaran sebesar Rp3,6 miliar di Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Paser. Komisi IV DPR RI tentunya ingin menjadi mengawasi penggunaan fasilitas tersebut. Nah, itu siapa sebetulnya yang dapat difasilitasi oleh Kementerian LHK. Yang kedua, tanaman-tanaman lokal untuk hutan sosial itu belum dimanfaatkan dengan baik oleh LHK. Nah, saya anjurkan karena banyak sekali tanaman-tanaman lokal yang berbasis pangan itu belum disosialisasikan dengan baik oleh LHK. Hanya itu yang saya ingin tanyakan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Endang.

Yang berikutnya kami persilakan Bapak Pak Sutrisno.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Ibu Menteri beserta jajaran.

Saya langsung saja yang pertama di Direktur Jenderal PSLB3, bahwa wabah covid-19 bukannya berkurang malah meluas, masuk pada cluster keluarga. Oleh karena itu, untuk menanggulangnya, untuk mencegahnya, agar program yang sudah dirintis tahun 2020 itu penyaluran bantuan disinfektan di agar juga diprogramkan karena juga kabupaten-kabupaten yang lain juga sesungguhnya memerlukan. Hanya dengan jalan itu sehingga penyebaran covid diantara keluarga bisa dicegah.

Yang kedua, bahwa program di tahun 2021 itu adalah lebih juga pada program pembangunan ekonomi kerakyatan. Menjadikan hutan sebagai objek pembangunan ekonomi kerakyatan dengan mengembangkan desa wisata, kebun Bibit rakyat, Bank Pesona. Untuk pengembangan desa wisata Ibu Menteri, dipastikan respon publik juga sangat kuat. Hanya juga tentunya perlu pengawasan yang yang lebih ketat. Ada kejadian di minggu kemarin bahwa dengan dalil untuk membangun desa wisata justru hutannya dirusak. 14 hektar hutan pinus itu di rusak di Hulu Sungai Cisuluang di Kabupaten Majalengka. Saya sudah menegur dua kali kepada ADM Kabupaten Majalengka malah jawabannya "Saya lagi menunggu proposalnya". Oleh karena itu, hutan memang harus dimanfaatkan buat kehidupan rakyat, tapi tentunya pelestarian pun juga harus dilakukan.

Kemudian mensikpai, menambahkan apa yang di disampaikan Bapak Darori Ibu Menteri, untuk percepatan realisasi anggaran, saya kira program KBR, program Bank Pesona adalah program yang bisa mempercepat realisasi anggaran. Dan juga hasilnya output-nya, *outcome*-nya pun juga jelas dalam rangka melestarikan hutan, dalam rangka mengukuhkan rakyat di pedesaan juga tumbuh ekonominya, sebagai satu upaya bagaimana juga kita membangkitkan keterpurukan ekonomi daerah akibat wabah COVID ini.

Kemudian yang ketiga, beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan kebakaran hutan di Taman Nasional Gunung Ciremai dan dampaknya di musim hujan kemarin itu arus air dari arah Gunung Ciremai ke pemukiman penduduk itu juga sangat kuat. Saya tidak membaca di Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem ada program bagaimana apa namanya menanam kembali. Kami hanya mohon untuk segera ditindaklanjuti, ditanggulangi agar dampaknya tidak meresahkan masyarakat. Di sisi lain di hutan Taman Nasional Gunung Ciremai itu ada apa nama pengembangan wisata dikembangkan oleh masyarakat desa sudah endapatkan penghargaan nasional sebagai surga yang tersembunyi. Persoalan yang dihadapi oleh masyarakat desa belum mempunyai keleluasaan untuk bisa mengembangkan pengunjung sudah mencapai 20.000 pengunjung kepada wilayah itu. Minggu kemarin pun juga Pak Gubernur, Pangdam dan Kapolda juga mengunjungi di sana, permintaan dari masyarakat di sana bisa diberikan izin usaha penyediaan sarana wisata alam yang selama ini semuanya masih dalam pengelolaan Balai Taman Nasional Gunung Cermi. Saya kira itu Pak, Ibu Menteri dari saya cukup 2 menit, karena dibatasi 2 menit.

Terima kasih mudah-mudahan bermanfaat.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Sutrisno.

Berikut kami persilakan Pak Bambang Purwanto.

Maaf Bapak Bambang suaranya belum keluar, Bapak Bambang maaf belum kedengeran.

F-PD (BAMBANG PURWANTO, S.S.T., M.H.):

Ya KLHK berhubungan garda terdepan dalam rangka menjaga lingkungan yang saat ini sudah banyak mulai terjadi kerusakan di mana-mana terutama di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat postur anggaran saat ini di KLHK ini cukup memadai, hanya saja ini harus tepat sasaran. Perlu kami sampaikan bahwa di Kalimantan Tengah ini banyak terjadi banjir saat ini. Dan kemarin kami dengan Bapak Wamen mengunjungi daerah di Kabupaten Lamando, di mana masyarakat di sana sebenarnya menerima kehidupan apa adanya dan dia siap untuk menjaga kelestarian alam di sekitarnya. Namun demikian, masih banyak keluar izin yang justru mengakibatkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, ini harus selektif.

Kemudian program PDASHL dan KSDAE ini supaya tepat sasaran. Untuk masyarakat yang pedalaman tentunya ini perlu menjadi perhatian Ibu Menteri untuk memberikan program Bank Pesona maupun produktif, sehingga mereka bisa menanam kembali hutan-hutan yang sudah mengalami kerusakan. Karena kalau tidak ini akan menjadi problem yang sangat serius terkait dengan kerusakan lingkungan.

Saya kira itu yang penting bagi KLHK berkomitmen Mengandalkan anggaran daerah tidak akan mungkin mampu. Oleh karena itu, peran kementerian sangat kami harapkan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Bambang.

Yang terakhir kami persilakan Bapak Hermanto, waktu 3 jam.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Kelamaan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Ketua, Pimpinan, Anggota Komisi IV DPR RI,
Ibu Menteri bersama jajarannya.

Saya ada berapa hal yang saya ingin sampaikan, pertama adalah terkait dengan soal anggaran karena waktunya juga sudah semakin sempit untuk 2020 ini, semoga bisa terealisasi. Kemudian yang kedua, terkait dengan kawasan antara Kota Padang sampai ke Solok Selatan itu sering sekali terjadi longsor, sering sekali terjadi tergerusnya hutan-hutan. Saya minta supaya ini Ibu Menteri harus memperhatikannya secara serius, saya khawatir nanti setiap ada longsor selalu di situ terjadi jembatan putus, jalan putus itu bisa menghambat ekonomi masyarakat.

Kemudian yang ketiga, saya meminta juga bahwa program-program yang berbasis masyarakat untuk 2020 ini dan juga untuk 2021 nanti, ini harus mendapatkan prioritas di dahulukan. Karena inilah program yang sebenarnya bisa memulihkan ekonomi masyarakat dalam jangka pendek itu mengatasi COVID-19. Yang keempat, saya beberapa waktu yang lalu ketemu dengan masyarakat di sekitar hutan di daerah-daerah Sumatera Barat, Solok Selatan, dan lain sebagainya itu masyarakatnya hampir sama sekali tidak peduli dengan kondisi covid, salaman juga begitu, kemudian kalau tidak menyambut salamnya kita nanti dianggap tidak menghargai mereka. Jadi saya melihat ini ada semacam awareness atau semacam kesadaran di masyarakat itu belum juga mengetahui tentang bahaya covid seperti itu. Nah, saya minta Ibu Menteri harus memberikan penyuluhan kepada masyarakat sekitar hutan bahwa kita ini sedang di tengah ancaman kematian. Kemudian juga ini harus kita serius juga.

Kemudian terkait juga dengan saya perlu juga mendapatkan penjelasan dari Ibu Menteri, seperti apa sih kondisi covid kita di Kementerian Kehutanan ini. Mengapa demikian? Karena Jakarta ini sudah menjadi perkantoran itu sudah menjadi cluster baru dan cluster yang terbesar di DKI ini penyebarannya di perkantoran. Saya minta ini Kementerian Kehutanan ini juga harus terbuka sebenarnya seperti apa sih penanganan COVID di Kantor Kementerian itu. Saya menduga mungkin ada yang sudah terpapar cuman kita belum ada informasi resmi, bahwa ada berapa yang sudah menyampaikan persoalan ini kepada kami.

Kemudian yang terakhir, saya minta juga dikawasan hutan harapan itu, itu harus ada semacam penanganan secara serius supaya tidak terjadi pelanggaran atau pengurusan hutan karena ada kepentingan-kepentingan bisnis di sana, ada pembentukan jalan atau segala macam yang mengambil luas hutan harapan, ini bisa merusak ekosistemnya. Saya minta ini supaya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Kiki tadi dan juga di oke kan oleh Bapak Ketua kita harus Rapat Dengar Pendapat untuk menggali lebih jauh tentang sebenarnya apa sih yang terjadi disitu.

Demikian Bapak Ketua, Ibu Menteri mohon perhatiannya untuk Dapil Sumatera Barat.

Demikian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Di dengar Bapak Hermanto, aspirasi untuk Sumatera Barat.

Demikian pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR RI. Selanjutnya kami persilakan Ibu Menteri KLHK untuk menyampaikan tanggapannya.

Terima kasih, silakan Ibu Menteri.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih Bapak Ketua.

Terima kasih yang terhormat Ibu dan Bapak Anggota.

Pertama, saya menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan juga termasuk sebagai dukungan ini adalah harapan dan permintaan untuk Kementerian LHK hati-hati dan waspada soal realisasi. Memang kalau lihat pola realisasi anggarannya di Kementerian seperti itu, sehingga pada akhirnya bisa dilakukan capaian di bulan Desember. Kalau kita lihat polanya memang karena ada kaitan dengan kontrak-kontrak itu. Jadi kontrak belum terbayar, sudah dikerjakan semuanya tapi administrasinya belum. Jadi ada pola-pola kerja yang seperti itu. Oleh karena itu, menjadi perhatian kami ya memang kalau yang PPKL, misalnya saya kasih contoh yang ekstrem ya sebetulnya sebelum anggarannya ditambah dia realisasinya sudah 62%, tapi karena anggarannya ditambah berarti ada pekerjaan persiapan lagi, kontrak, tender, kontrak, dan lain-lain tapi itu sudah bisa diselesaikan, sehingga konstruksi sudah bisa mulai di minggu keempat September dan Oktober awal, maka sebetulnya pada dasarnya bisa dikejar, tapi catatan-catatan menjadi perhatian kami.

Yang kedua, berkaitan dengan mangrove. Ini memang sesuatu yang kita harus dekati secara konseptual. Jadi model-model kerja di LHK sekarang sejak era Presiden Jokowi ini dan di era Komisi IV DPR RI dan pada waktu yang lalu kami di Komisi VII DPR RI, itu memang betul-betul banyak hal yang baru ditangani dan harus didekati secara konseptual, contohnya misalnya mangrove kita itu kira-kira 3,4 juta hektar kira-kira 630 ribu itu kritis. Kita jaga, kita sekarang kita rehab pakai RHL, kenapa juga RHL jadi angkanya besar dananya, termasuk RHL itu juga mangrove, kita rehab. Kami sudah konsul, Bapak Presiden menanyakan ini bagaimana supaya cepat diberesin. Saya mengusulkan 60 ribu hektar tapi ternyata dananya kita sekarang cuman punya untuk 15 ribu hektar. Sebetulnya itu langkahnya tapi ada yang hal-hal konseptual juga harus kita selesaikan, kan mangrove itu bukan hanya dari dalam hutan, ada juga yang diluar hutan. Mangrove itu juga oleh orang-orang dipakai untuk industri arang kayu terus diekspor. Maka ini yang saya katakan

bahwa menanganinya harus konseptual, kita juga sambil bekerja sambil memikirkan lalu regulasinya bagaimana, mengajak Pemda seperti apa, misalnya seperti itu.

Yang ketiga, saran-saran dan aspirasi kami perhatikan seperti Ropa, Gandang Dewata, Sanggar Agro Karya, Leuser, Ekowisata Gajah, DAS Solo, tanaman local untuk perhatian dan desinfeksi sebuah kabupaten, Taman Nasional Gunung Ceremai untuk kemitraan, dan lain-lain ini kami sudah catat. Dan tentang ecological fiscal transfers, inikan sebetulnya bukan cuman soalnya KLHK, ini soal monetary. Tapi begini, kalau para pihak punya gagasan, pandangan harusnya jangan di diametalkan, KLHK-nya begini, KLHK-nya begitu tidak, karena KLHK betul-betul sangat terbuka. Jadi sebagai gambaran seketika KLHK ini mulai saya tangani, saya betul-betul membuka diri, masuklah para ahli, masuklah NGO. Mari kita lihat apa yang ada di dalam.

Ibu Luluk yang terhormat, dari segala yang muncul sebagai gagasan itu ada yang bisa langsung dikerjakan. Ada misalnya begitu dapat idenya, oke deh ini bagus kita selesaikan. Tapi ada yang baru bisa kemudian satu atau dua bulan kemudian karena kan misalkan harus diartikulasikan. Ada yang satu tahun, dua tahun, ada yang lama begitu, karena kan banyak dimensinya. Oleh karena itu, yang ingin saya katakan adalah kalau ada gagasannya silakan saja di diskusikan. Beritahukan nanti kita akan lihat begitu, jadi tidak dalam posisi diametral gitu, serang KLHK-nya, sikat KLHK-nya, gue maunya ini. Nah, itu menurut saya tidak fair seperti itu dan itu terjadi sekarang.

Kemudian soal *Food Estate*, saya ingin menegaskan lagi tadi catatan di awal dari yang terhormat Pimpinan, bahwa kita akan menyampaikan kajian lingkungan hidup strategisnya secara lengkap, tadi sudah disediakan waktunya. Saya dari awal memang meminta ini di FGD-kan, karena tidak mungkin menerangkan ini dalam satu Rapat Kerja yang sangat singkat. Contohnya tadi misalnya, jangan ditarik secara linier misalnya, bahwa kalau 30 ribu diusulkan oleh Bupati Humbang tapi yang layak ternyata hanya 19 ribu karena 11 ribu itu adalah catchment area Danau Toba. Tapi terus jangan di linierkan bahwa dengan demikian dana yang di Kementerian Pertanian harus dikurangi, tidak seperti itu. Tetapi dalam kajian assessment-nya kita harus lihat bahwa disitu sebetulnya untuk masyarakat. Jadi ada Tapanuli Utara, ada Tapanuli Tengah, ada Pakpak Barat, itu satu system dari system hutan produksi yang sudah tidak berfungsi baik maupun yang hutan produksi yang dapat dikonversi, sehingga jumlahnya malah jadinya 61 ribu. Nah, yang penting kan bagaimana menyiapkan pentahapannya. Kalau Pertanian mengatakan cepat tahun depan, tahun ini, mungkin dia pada skala yang mikronya. Memang ada yang sedang dikerjakan, misalnya untuk 1000 hektar di areal penggunaan lain, maka kita harus kemasnya menjadi begitu rupa yang tadi seperti kami laporkan betul-betul untuk bermanfaat pada masyarakat.

Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa sih anggaran KSDAE dan PDASHL yang terbesar, karena memang jantungnya sumber daya alam kita ya di situ. Kawasan konservasi kita itu 27 jutaan, kawasan hutan lindung

kalau tidak salah 29 juta ya, kawasan konservasi atau KSDAE itu punya fungsi utama, yaitu menjaga life support system. Secara teori berarti dia menjaga sistem genetik sampai jadi, artinya dia menjaga rantai pangan, dia menjaga rantai energi, dia menjaga rantai karbon. Jadi memang di sini sebetulnya jantungnya sumber daya alam kita sebagai modal dasar bangsa. Oleh karena itu, selain tentu pekerjaannya juga banyak 6000 desa misalnya di dalamnya, ada masyarakat adatnya yang mesti dijaga, kemudian ada kondisi-kondisi rusaknya yang mesti diperbaiki. Jadi memang kuncinya itu di situ, apalagi saya berterima kasih banget karena ternyata Komisi IV DPR RI melihat ini justru tepat, karena internasional sekarang justru sedang menyoroti itu dan Indonesia sejak Juli tahun lalu kita sudah termasuk middle up income countries. Jadi artinya kita primitif lagi, kita enggak terbelakang lagi dalam menghadapi persoalan-persoalan. Jadi kita sudah bisa lihat bersama-sama ini persoalan yang utama.

Kalau PDASHL memang ada perintah Bapak Presiden yang terhormat Bapak Hansi, bahwa Bapak Presiden bilang “saya maunya kerusakan lingkungan dipulihkan secepatnya dari 14,3 juta hektar lahan kritis kita”. 14,3 juta itu kalau dikali 1 hektar kira-kira indeksnya ada yang 14 juta, ada yang 17 juta per hektar. Kalau sudah di mangrove masuknya mungkin sampai 21, 27 juta cara rehabnya. Jadi memang nilainya gede banget dan saya berterima kasih gitu. Nah, kemudian ini nanti kaitanya dengan lingkungan ini, ini saya kira Tuhan juga yang menolong kita, membimbing sampai ke sini. Kita sudah kuat main di KSDAE sekarang, kita juga mulai kuat main di RHL. Secara ideal sebetulnya RHL kita itu apabila kita lakukan dia akan standar kita punya kondisi-kondisi bisa mengatasi perubahan iklim kalau kita bisa merehab satu tahun 800 ribu hektar. Tapi kapasitas kita sekarang paling hanya 200 ribu Pak Hansi, dengan dana yang ada. Oleh karena itu, maka saya mengintensifkan ini para pemegang izin tambang “ayo dong tanam dong”, itu agak lumayan satu tahun bisa 60 ribu hektar saja sudah lumayan. Bayangin kali 14 ribu, kali 17 ribu, misalnya gitu. Jadi ada yang nyusul setelah ini, yaitu tadi yang ditanyakan oleh Bapak dan Ibu yang terhormat, tentang dana lingkungan. Mengapa PPKL dananya kecil? Nah, di dalam sistem anggaran kita itu ada namanya yang prioritas nasional, ada yang prioritas sector, tapi jangan dikotomikan antara nasional dan sector. Artinya semuanya penting, tapi ada yang tadi first thing first, mana yang mesti di duluin banget.

Nah, dari tadi abis konservasi RHL sekarang nyusul ternyata pemulihan lingkungan di mana-mana harus dilakukan. Seperti itu tadi bekas tambang, kemudian yang di tepi-tepi sungai yang berliku-liku itu jadi tempat sampah, ada bekas galian-galian kuori, pasir, apa segala, itu di PPKL mulai dibanahi. Tapi kan dia enggak bisa dananya mau kita kalau gitu biar gampang ambil dari RHL Rp800 miliar misalnya, kan nggak bisa, kan kita sudah mengartikulasikan dengan konfigurasi ini begitu, kalau mau ditambah. Itu sebabnya saya juga dari awal selalu dan terus terang sudah mendapatkan dukungan. Saya merasakan banget dukungan dari Komisi IV DPR RI, tapi ada yang belum bisa kita capai, yaitu untuk dana-dana bagi dua sektor lingkungan yang ada di KLHK, yaitu di PSLB3 maupun di PPKL. Kenapa? karena memang dia ada yang terbagi ke DAK, DAK-nya lebih kuat dia sebetulnya, secara kelembagaan eksternalitasnya itu lebih nyangkut di

kabupaten. Oleh karena itu, memang kita sebagai anggota, kita sebagai aparat, itu yang harus mendorong supaya kabupatennya aware dan keren begitu soal ini. Itu sebabnya juga kami minta waktu itu untuk FGD tentang ini, karena ini sebuah sistem yang harus dibangun.

Sebagai gambaran Ibu dan Bapak yang saya hormati, waktu menyatunya KLHK anggarannya LH itu cuman Rp650-an miliar sampai Rp700 miliar anggaran yang kehutannya kira-kira 4 koma sekian hampir Rp5 triliun. Jadi waktu di satuin itu kira-kira jadikan naiknya itu yang harus diatur. Nah, sekarang berarti potensi kenaikan anggaran di sektor lingkungan yang mesti dasyat. Dan ini hanya keputusan politik yang bisa melakukan itu begitu. Oleh karena itu, tahun ini memang PPKL atas arahan Bapak Wakil Presiden dan juga sudah mendapatkan restu Bapak Presiden, sudah dibahas di Kemenko Meritim, kita menyiapkan rancangan Peraturan Presiden untuk pemulihan lingkungan dari kegiatan pertambangan. Nah, tadi juga yang terhormat Ketua Budi, bahwa kita juga melihat potensi dunia usaha, potensi masyarakat, dengan sistem adopsi pohon dan lain-lain, dia juga bisa sangat baik untuk memelihara sehingga dia ada nilai apresiasinya dengan karbon. Nah, kam laporkan bahwa rancangan Perpres karbon sebetulnya sudah dibahas di Setkab, di Setneg dan sekarang dalam proses harmonisasi dengan agenda-agenda lain yang selaras, misalnya tentang inventarisasi gas rumah kaca, misalnya tentang pembangunan rendah karbon, misalnya lagi tentang kewajiban menurunkan emisi gas rumah kaca dari Indonesia kepada dunia, itu sekarang lagi disatu-satukan, mudah-mudahan bisa di selesaikan dalam waktu yang cepat.

Jadi saya berterima kasih, memang dari hulu-hilir semua lagi diberesin dan saya berterima kasih dengan dukungan politik Komisi IV DPR RI kita sebetulnya sedikit-sedikit melangkah sampai sudah ke bentuk. Terus terang saya memang sedang agak risau sedikit bagaimana bisa ngedonkrak, ngeberesin lingkungan ini. Sebab kalau setiap misalnya kan kita sering lihat sampah-sampah numpuk di tepi sungai, di bawah jembatan sedikit. Nah, itu sebetulnya dengan dana hanya kira-kira 800 juta, 1 miliar itu bisa dibuat rapi begitu rupa sama anak-anak karang taruna terus diolah jadi tempat wisata local. Sama dia dikasih jembatan bamboo, dikasih taman, Pak Dirjen tinggal kasih sistem yang namanya biocord, biocord itu untuk menyaring pencemaran-pencemaran. Jadi air yang keluar lagi sudah bersih, tapi disitu ada tamannya, ada setting-nya, dananya sebetulnya tidak besar, tapi bayangin Sungai Citarum saja yang panjangnya 69 kilo misalnya berapa titik itu yang kayak gituannya gitu. Jadi saya berterima kasih sekali lagi, kita sedang kerja keras dan konseptual untuk pemulihan lingkungan ini.

Tadi Bapak tentang Polhut, Pak Dirjen melaporkan kepada saya katanya 2017 itu sudah ada tapi cuman 2.200 unit, tahun 2019 cuman 2.800 unit, tahun 2020 cuman 2.800 seragam tapi memang belum secara menyeluruh. Oleh karena itu, kami akan lihat lagi dan kita akan perhatikan.

Saya kira itu Pimpinan, kurang lebih mohon maaf.

Terima kasih.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ada tanggapan, Bapak Johan silakan.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Soal penambahan anggaran dari berbagai Ditjen ke kegiatan yang di Minamata itu belum di jelaskan Ibu Menteri.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak, bisa dijelaskan.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Kegiatan Minamata itukan ada tambahan 77 miliar dengan mengurangi anggaran dari situ.

KETUA RAPAT:

Minamata ya, silakan.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Kalau misalnya itu dianggap penting karena kita adalah tuan rumah dan ini soal isu global dan segala macam, maka yang kita tuntut sebenarnya jangan ganggu anggaran Kementerian. Silakan negara ini memfasilitasi itu dengan baik sebagai cara kita menghormati tamu, tapi jangan ganggu anggaran Kementerian, kalau mau tambah anggaran Kementerian untuk mensukseskan acara itu.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Johan.

Ibu Menteri, Bapak Sekjen kira-kira bisa ditanggapi.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Masalahnya kan memegang tanggungjawab, mendapat mandate dari Lembaga internasional itukan harus kita lakukan, apalagi itu ada convensinya dan sudah ada Undang-Undangnya begitu. Jadi kalau KLHK disuruh nyari anggaran lagi saya juga saya tidak ngerti pakai mekanisme yang mana begitu. Dan memang di Komisi IV DPR RI inilah tempat untuk bersandar dan mengkonsultasikan hal ini. Pak Ketua, saya kira penyelenggaraan sebagai Presiden Cov, Presiden Cov itu artinya secara internasional bertanggungjawab untuk mendorong langkah-langkah dan juga sekaligus menjelaskan apa yang sudah kita lakukan.

Terus terang di dalam penanganan merkuri ini Indonesia tidak ketinggalan dan bisa menjadi contoh, misalnya begini. Misalnya unit-unit peralatan gigi misalnya, itu yang air raksanya sudah dikeluarkan atau thermometer badan misalnya itu air raksanya sudah tidak boleh. Dan itu memang tanggung jawabnya sector lingkungan. Jadi Bapak Ketua, saya mohon maaf dan mohon izin bahwa ini memang harus dicover. Dan kalau soal efisiensi dan lain-lainnya kan sudah menjadi artikulasi begitu, jadi kita selesaikan kombinasi dan artikulasi ini.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Pak Ketua, mohon maaf saya ingin melanjutkan. Ini soal perencanaan Ibu Menteri, kalau misalnya dari awal-awal sudah kita rancang bahwa kita memang akan menjadi tuan rumah yang baik pada acara itu, kenapa kita dari awal kita power full untuk menempatkan anggaran disitu. Kenapa ketika setelah pembahasan baru kemudian kita mengurangi ini, mengurangi ini, dan yang paling parah yang menjadi perhatian Ketua, Itjen jangan dikurangi, tapi disini 10 miliar dari anggaran Itjen itu dikurangi, dari Kesekjenan juga ada 25 miliar sampai kita mendapatkan angka 77 miliar. Itu yang saya bilang ini soal perencanaan, jangan sampai kemudian kita itu artinya waktu kita rancang bahwa kegiatan inikan mau diambil, disimpan di beberapa Ditjen, baru pada ujungnya kita akhir, kasihan Ditjen dalam membuat perencanaan. Jadi kritik saya disitu soal perencanaan anggaran, artinya betapa mudah kita menggeser anggaran-anggaran atau program-program yang ada di Ditjen itu untuk kemudian kita alihkan kepada kegiatan yang sifatnya penting tapi ceremonial. Itu Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Bapak Johan.

Saya kira Ibu Menteri, ini saran saja Bapak Johan ya, untuk ke depan perencanaan-perencanaan lebih matang. Tapi saya kira juga dari kami, kami mendukung penuh acara Minamata *Convention* ini, karena memang ini suatu kehormatan juga bagi kita di mata dunia. Jadi yang dipermasalahkan bukan acaranya tentunya pasti kami mendukung, cuman ke depan mungkin perencanaan lebih matang saja ya Pak Johan.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.):

Harapan kita sebenarnya Pak Budi Ketua, adalah penambahan anggaran sebenarnya untuk KLHK. Jadi untuk acara ini karena ini acara internasional seharusnya Menteri Keuangan atau mungkin nanti ada dari KLHK-nya supaya ditambahkan sebenarnya sehingga tidak mengganggu yang lainnya. Itu saja Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Baru tadi saya mau katakan Bapak Andi, sebenarnya PR kita bersama ini kita mau sama-sama membereskan lingkungan, kita mau sama-sama nanam lebih gila lagi. Komitmen Komisi IV DPR RI berarti tahun depan ini kita harus bagaimana caranya kita dongkrak itu anggaran Kementerian lebih naik lagi. Bagaimana teman-teman sepakat tidak ini nanti, ya Ibu Menteri ini sudah komitmen kita bersama semoga kinerja Ibu Menteri selalu baik, pencapaiannya hasilnya luar biasa, kita yang nanti kita dorong KLHK anggarannya lebih besar lagi.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Pimpinan, ini saran saya, ini cuman saran saya. Inikan PSLB3 inikan anggarannya kecil sekali apalagi pada masa pandemi COVID-19. Inikan dipotong sampai Rp25 miliar, kalau bisa dibagi bebannya.

KETUA RAPAT:

Sudah ditambah Bapak Ketua.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Ditambah untuk Cov kan ini jadinya, saya tidak mengerti berarti kan dikurangi ini, dikurangi untuk Cov ya gue tidak mau itu. Itu loh kan gue ngomong benar kenapa tidak dibagi bebannya. Saya agak bingung juga ini, semula kan PSLB3 nilainya Rp246 miliar jadi Rp271 miliar ada penambahan tapi penambahannya untuk Cov yang di Bali, Minamata.

KETUA RAPAT:

Ya terima kasih Ketua.

Ini betul Ibu Menteri, jadi ini sesuai dengan bahan yang diberikan kepada kami dari anggaran Sekretariat Jenderal dan Ditjen PSLB3 itu ada penambahan dengan penjelasan untuk mendukung pelaksanaan Minamata 2021. Begitu ya Bapak Ketua?

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Jadi ada tambahan Rp60 miliar sebenarnya untuk mendukung pelaksanaan Minamata 2021.

Ibu Menteri mungkin bisa.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih Pimpinan.

Ini saya dapat catatan dari Bu Dirjen bahwa yang di sampaikan oleh yang terhormat Bapak Ketua, Bapak Sudin, bahwa penyediaan fasilitas pengolahan limbah B3 dari Yankesnya itu sudah ada Rp41,7 miliar kemudian sudah juga Bank Sampah, PDU, Biodigester. Bapak Ketua, sebetulnya kalau kita bicara tentang PSLB3 dan penanganan sampah, kemudian limbah medis rumah sakit yang berpengaruh itu bukan hanya soal fasilitas tapi juga soal regulasi, *guidance* dan sebagainya.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Ibu Menteri, sebetulnya bukan fasilitas tetapi mental manusianya itu yang paling penting.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Siap Ketua, berarti di-*law enforcement* jadi nanti dengan kita akan lihat nanti dalam perjalanan bersama-sama Ketua, dicek saja. Tetapi secara internal sebetulnya Dirjen sudah mencoba meng-ajust seperti yang dimaksud oleh Pimpinan.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Menteri.

Ada tanggapan apa lagi?

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.):

Sebelum kesimpulan begini Ketua, inikan Rp60 miliar tambahan. Mungkin Anggota Banggar kan belum ditutup di sana, mengusulkan agar mungkin Menteri Keuangan menambahkan Rp60 miliar ini untuk, kalau ada kalau tidak ada ya tetap menggunakan skema seperti ini Ketua.

KETUA RAPAT:

Masih bisa tidak di Banggar Pak Suhardi.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Izin saya hanya menambahkan, kalau ada dari kemarin sudah dimasukan ada penambahan, ini sudah tidak ada penambahan. Inilah makanya kita rapat finalisasi bahwa tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan. Walaupun saya bukan Anggota Banggar saya agak ngerti dikitlah Pak Budi.

KETUA RAPAT:

Oke, baik terima kasih.

Sebelum kami tutup mari kita lihat rancangan kesimpulan rapat.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Tapi izin Ketua, saya hanya mengingatkan ini karena ini pengalaman dari kanjeng. Nanti paling lama 1 minggu pertanyaan-pertanyaan Anggota yang belum dijawab, baik per Eselon I maupun kepada Ibu Menteri, maupun kepada temannya Mbak Kiki Bapak Sekjen, mohon ada jawaban tertulis. Supaya nanti kita "oh, iya saya pernah nanya ini tapi belum ada realisasi", ya Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Siap Pimpinan.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pimpinan.

Pak Kyai silakan.

KETUA RAPAT (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ibu Menteri dan segenap pejabat Eselon I, para Direktur Utama Inhutani dan Perhutani,
Segenap Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI.

Alhamdulillah semua saran dan pendapat yang telah dijawab maupun jawabannya berupa lisan akan tertulis nantinya. Jawaban yang Insya Allah sudah mendekati sempurna, karena secara akademis tadi lontaran pertanyaan Bapak Dosen baik virtual maupun yang ada di sini sudah terjawab. Pertanyaan dari NGO yang hari ini sudah menjadi politisi dari Luluk yang dianggap tertutup KLHK, sudah dijawab. Coba NGO itu ajari administrasi yang benar, menyimak dan membaca ketentuan juklak dan juknis sehingga permohonannya bisa dijawab dengan sempurna.

Bapak dan Ibu sekalian.

Saya akan membacakan kesimpulan agar supaya rapat ini segera disudahi sebagaimana keinginan Pimpinan lebih cepat lebih baik. Yang pertama mohon disimak khususnya para Pejabat Eselon I pengguna anggaran dan para Sekjen, sehingga nominal yang akan ditetapkan oleh Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI bisa diimplementasikan Tahun Anggaran 2021 dengan benar dan tepat.

1. Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RKA K/L Tahun 2021 sebesar **Rp7.957.114.783.000,00** (tujuh triliun sembilan ratus lima puluh tujuh miliar seratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:
 - a. **Sekretariat Jenderal**, sebesar Rp546.509.240.000,00 (lima ratus empat puluh enam miliar lima ratus sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - b. **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp80.613.724.000,00 (delapan puluh miliar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - c. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari**, sebesar Rp342.275.694.000,00 (tiga ratus empat puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - d. **Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung**, sebesar Rp2.177.333.560.000,00 (dua triliun seratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - e. **Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem**, sebesar Rp1.925.381.253.000,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
 - f. **Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan**, sebesar Rp410.303.585.000,00 (empat ratus sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - g. **Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan**, sebesar Rp363.461.912.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga miliar empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);

- h. **Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, sebesar Rp344.665.771.000,00 (tiga ratus empat puluh empat miliar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- i. **Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim**, sebesar Rp301.879.106.000,00 (tiga ratus satu miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam ribu rupiah);
- j. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya**, sebesar Rp271.968.331.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- k. **Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**, sebesar Rp249.465.285.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- l. **Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi**, sebesar Rp317.017.832.000,00 (tiga ratus tujuh belas miliar tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- m. **Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM**, sebesar Rp313.243.965.000,00 (tiga ratus tiga belas miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah); dan
- n. **Badan Resotransi Gambut**, sebesar Rp312.995.525.000,00 (tiga ratus dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan menyampaikan hasil pembahasan RKA K/L Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 kepada Badan Anggaran DPR RI untuk mendapatkan penetapan.

Apakah dapat disetujui?

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Ketua, sebentar Ketua.

Ibu Menteri, ini saya hanya menayakan kan kelembagaan kementerian LHK sudah ada, saya kira tidak lama akan berubah, apa ini tidak disesuaikan langsung dengan lembaga baru. Terus yang kedua Litbang kalau tidak salah tidak ada lagi Ibu, apakah ini uangnya tidak digeser ke tempat lain atau Litbang ikut berangkat pindah ke institusi baru nanti Ibu.

Terima kasih Ibu.

KETUA RAPAT:

Silakan ditanggapi Ibu.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih Pimpinan.

Yang terhormat Bapak Darori.

Badan Litbang itu memang sesuai Undang-Undang tentang BRIN itu akan disatukan di bawah Kementerian Ristek Dikti. Tetapi di dalam pengaturan-pengaturannya itu ada Itbang-Litbang yang langsung kepada pengambilan kebijakan itu tinggal ada di kementeriannya. Kemudian disisi lain di KLHK, Badan Litbang ini namanya tidak Badan Litbang lagi tetapi Badan Standarisasi Instrumen LHK. Apa artinya? Ini sebetulnya mengawal implementasi RUU CK, jadi ketika ada pandangan bahwa RUU CK ini tanda kutip cukup mengkhawatirkan maka kekuatannya akan ada di low enforcement, low enforcement ada gradasinya. Ada *law enforcement* pembinaan oleh Direktorat Jenderal, ada *law enforcement* pengawasan menurut standar, jadi badan ini akan membuat standar dan protap untuk kontrolnya, karena RUU CK mainnya kan di perizinan maka dia akan NSPK sambil nanti prosedur kontrolnya dan lain-lain. Lalu gradasi yang terakhir adalah penegakan hukum. BRIN sendiri sekarang masih dalam posisi transisi untuk mengatur semua Litbang-Litbang dari seluruh Kementerian. Dan untuk ini akan dibahas kembali sambil berjalan nanti sesuai jadwalnya oleh Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas, jadi sementara kita keep seperti ini Bapak. Sambil saya secara internal juga melakukan adjustment kepada badan standart dan *law enforcement* dari RUU CK.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Sudah cukup jelas ya Pak, nanti ada perubahan anggaran kan bisa dirubah nanti.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi IV DPR RI terus mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar fokus perencanaan program kerja Tahun Anggaran 2021 diarahkan untuk mendukung program yang berdampak langsung pada pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

Setuju Anggota redaksi?

Ibu Menteri, sepakat?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Setuju Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi IV DPR RI terus mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penyesuaian (penambahan) pagu anggaran pengadaan bibit tanaman hutan produktif berkualitas pada tahun anggaran 2021.

Ini komitmen KLHK terhadap pemulihan ekonomi dan restorasi sosial ya Ibu. Sepakat kan, setuju Anggota? Sepakat Ibu?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Setuju Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penyesuaian Pagu Anggaran Tahun 2021 untuk mendukung percepatan kegiatan pengelolaan limbah medis yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan dalam penanganan pandemi COVID-19.

Setuju?

Silakan ini ikhtiar tambah, persoalan tidak tambah kan tidak apa-apa Ibu.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Bapak Ketua, saya minta maaf kalau ada perintah dari Komisi dari yang terhormat Lembaga di DPR RI, ini sebetulnya akan langsung mengambil misalnya dari RHL, dari KSDAE, bisa langsung dipindahin kesana. Padahal kita sedang berpacu dengan persoalan-persoalan tadi ketika saya menjawab yang terhormat Bapak Hansi. Jadi kalau boleh mungkin ikhtiar penambahan dana-dana di sektor lingkungan memang betul-betul mesti konseptual. Kita kalau perlu FGD dan kita jebretin karena memang hanya keputusan politik, tapi kalau keputusan politiknya sudah diambil nanti dengan enteng Bappenas akan bilang "oke ya saya Tarik Rp800 miliar dari KSDAE, kalian mau apa, ini dari Komisi IV DPR RI sudah begini", itu saja saya khawatirnya ada mekanisme-mekanisme yang dimanfaatkan, misalnya seperti itu. Saya tidak *prejudice* tetapi kita perlu berhati-hati.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Mau ditanggapi Bapak Ansy.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Tidak, saya mau tambahkan sedikit saja. Saya setuju Ibu, harus didekati secara konseptual dan harus kuat. Sebenarnya kan logikanya sangat sederhana, saya berpikir kalau saya kasih contohkan Ditjen PSLB3. Ini dalam situasi pandemi begini kan sampah-sampah infeksius B3 itu kan luar biasa. Nah, karena itu kalau Pemerintah ngomong komit pada hal ini, itu harus ditunjukkan dalam bentuk politik anggaran, sebenarnya itu saja sangat sederhana kok. Nah, mungkin *mainstreaming* isu yang seperti ini harus kita lakukan dalam bentuk FGD-FGD ini, sehingga kita bisa tampil secara bonafit dari segi konsepsi Ibu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kan sudah ada dua FGD tadi yang dilontarkan Ibu Siti Nurbaya kan, silakan Ibu sepakat ini redaksinya?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Saya malahan kalau boleh ini jangan naik dulu Ketua, sebab ini akan langsung narik anggaran-anggaran yang juga penting begitu. Dirjen PSLB3 kan sebetulnya sudah ngitung juga sampah bekas masker, bekas apa, dia juga sudah hitung dari kota-kota berapa ton masuk dan segala macam. Sebenarnya upaya sudah dicoba Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Bagaimana Bapak dan Ibu, beliau menginginkan ini tidak ditampilkan diawali oleh FGD dulu sebagaimana.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Kalau Dirjennya bilang sudah cukup ya tidak perlu ada penambahan. Yang kedua Ibu Menteri, kami sementara tidak boleh FGD, sekali pun ada tambahan FGD harus disini tidak boleh di tempat lain, ini surat dari Pimpinan DPR RI. Betul Bapak Tomy? Nah, itu saja. Jadi saya rasa Nomor 4 diketok saja kalau bicara tadi Dirjennya merasa cukup.

Silakan.

KETUA RAPAT:

Diketok tidak ditampilkan Bapak Ketua ya, didrop kan, permintaan beliau didrop ini.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Sebetulnya kalau sudah cukup ngapain lagi ditampilkan, kalau sudah cukup.

KETUA RAPAT:

Didrop Ibu, ya silakan.

Terima kasih.

Bapak dan Ibu yang mulia.

Kita drop yang Nomor 4 tadi, sekarang Nomor 4 yang baru.

4. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis secara cepat dalam rangka memberikan rekomendasi terbaik untuk pembangunan *Food Estate* dengan pola multisistem menyeluruh di Provinsi Sumatera Utara, yang sekaligus dapat dijadikan sebagai *role model* dalam pengembangan pertanian untuk mendukung program ketahanan pangan di seluruh Indonesia.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Saya setuju karena ini satu provinsi bukan seperti kemarin satu kabupaten, kalau satu kabupaten itu ya *Insha Allah* pasti tidak benar.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan Bapak Suhardi.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Saya kira food estate ini di 3 provinsi, barangkali bagus juga masuk selain Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Papua, sehingga secara menyeluruh.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Izin Bapak Suhardi Duka, karena yang di Kalimantan Tengah itu sudah selesai permasalahannya dengan Kehutanan termasuk di Kalimantan Timur. Yang menjadi kendala ini adalah kemarin waktu dengan Pertanian, di Kabupaten Humbang itu 30 ribu hektar, terdiri dari 3 mata anggaran, yakni tentang bawang putih, bawang merah. Tapi setelah diterangkan mungkin beberapa kabupaten, mungkin 4 kabupaten, 5 kabupaten, tapi kalau yang Kalteng sama Kaltim memang sudah ada. Coba Pak Nasir, kalau yang Kalteng kan memang sudah bekas rawa toh.

KEPALA BADAN RESTORASI GAMBUT (Ir. NAZIR FOEAD, M.Sc.):

Izin Ibu Menteri, yang Kalteng KLHS-nya sudah ada, sudah selesai.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Ini belum Pak.

KETUA RAPAT:

Yang Papua bagaimana Ibu, permintaan Papua tadi dari Bapak Suhardi Duka.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih.

Izin Bapak Ketua, sebetulnya dalam konteks program strategi seperti ini, itu KLHK ada di depan. Kenapa dia ada di depan? Karena dia memberikan *guidance*, ini boleh loh tapi kayak begini, kayak begini. Hati-hati loh nanti ada ini, ada ini. Dan yang sekarang sedang kita persiapkan sebagaimana yang sudah disebut oleh Bapak Presiden, tapi waktu pidato kenegaraan beliau kan yang disebut Kalteng sama Sumut. Tapi sebetulnya yang kita persiapkan juga Papua di Merauke, Mappi, Bogen Digul, dan di Sumatera Selatan itu yang kita persiapkan. Memang karakternya beda-beda Bapak Ketua.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Ibu, yang di Merauke bekas Yamive.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Kita sedang melihat secara menyeluruh Ketua.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Jadi belum tahu lokasinya di mana.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Belum.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Berarti nanti kalau ada anggaran di Kementerian Pertanian 2021 untuk di Papua berarti kita harus batalkan, karena titiknya pun belum ada, termasuk disini di Sumatera Utara ini tahu-tahu ada 30 ribu kali sekian, termasuk juga di Kalimantan Tengah. 30 ribu akan dikerjakan pada 2020, saya tidak tahu pakai ilmu apa hitungnya, mungkin di sana banyak S3. Setahu saya kalau 30 ribu September, Oktober, November, Desember, mustahil. Itu saja.

Lanjutkan Pimpinan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Izin Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Sebentar, disetujui dulu ini Ibu.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Entar dulu, saya mau menjawab yang ini. Saya minta maaf, bukan karena Menteri Pertanian dari NasDem, bukan. Tapi saya mohon bahwa penjelasan saya ini jangan dijadikan dasar untuk mengambil keputusan tentang tadi cut anggaran di Kementan dan lain-lain. Karena begini, saya tadi bilang bahwa KLHK ada di depan, kita memang harus paling dulu mengatakan secara strategic seperti apa sih, kebijakannya apa, rencananya apa, programnya apa, penyesuaiannya harus bagaimana itu memang KLHK yang mesti ngomong. Bahwa mereka ada agenda di 2021 itu sangat mungkin terjadi Bapak Ketua. Itu sebabnya saya bilang jangan dari saya dijadikan dasar.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Saya paham Ibu, Ibu hanya memberikan rambu-rambu jalan, bahwa ini adalah jalan. Tetapi kalau tiba-tiba disini di Humbang tadi bilang 30 ribu mau ditanam 2020 kemudian di Kalimantan Tengah sudah dicantumkan anggarannya Ibu, bahkan detail menggunakan NPK Dolomit 5,5 juta kilo angkutnya pakai apa. Coba ke Kalimantan Tengah ke Pulang Pisau itu angkutnya pakai apa 5,5 kilo. Sedangkan September ini sudah mau habis, jadi ini bukan menyangkut Ibu, ini hanya saya jelaskan ke Ibu. Sudah ada detail NPK-nya, pupuk cairnya, benihnya, ininya, ininya, saya secara bodoh saya hitung juga kalau 5,5 juta kilo angkut ke Pulang Pisau saya tidak tahu pakai apa, kalau pakai pesawat Hercules pun tidak selesai-selesai 2 tahun, tapi bisa dikerjakan pada 2020, ini loh Ibu contohnya. Jadi saya paham ini tidak ada kaitan cut anggaran dengan Ibu, cuman kami sebagai mitranya Ibu

paling tidak punya *guide line* bahwa wilayah tadi yang di sini kalau hanya satu kabupaten tidak bisa, paling tidak lima kabupaten. Paham ya Ibu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Nomor 4 disetujui ya tadi.

(RAPAT: SETUJU)

5. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut untuk terus meningkatkan kinerja dalam rangka pencapaian target realisasi anggaran tahun 2020, dengan terus memperhatikan kaidah pengelolaan anggaran dan barang negara yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setuju?

Ibu?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

Demikianlah Bapak dan Ibu sekalian, kesimpulan Rapat Kerja hari ini. Semoga apa yang telah menjadi komitmen kita bersama-sama memberikan manfaat terutama pemilihan ekonomi dan restorasi sosial tahun anggaran 2021.

Bapak dan Ibu sekalian.

Dari saya pribadi dan segenap Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI manakala ada salah dan khilaf atas ucapan mewakili semuanya mohon maaf lahir dan batin. Itulah komentar dan selanjutnya silakan statement Ibu Menteri selaku eksekutif KLHK untuk di sampaikan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih.

Yang terhormat Pimpinan Komisi IV DPR RI,
Yang kami hormati Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI,

Seluruh jajaran komisi IV DPR RI yang sangat saya hormati dan saya banggakan.

Terima kasih yang tak terhingga atas dukungan politik dan juga catatan-catatan profesional yang disampaikan kepada KLHK untuk menjadi rambu-rambu di dalam penyelesaian pelaksanaan tugas untuk tahun anggaran 2020 dan 2021, termasuk konseptualisasi-nya ke depan. Saya terus terang menambah lega perasaan saya dengan situasi dan dukungan ini, karena kita memang perlu optimisme untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang berat, yang cukup berat di aspek lingkungan, terutama yang sekarang setelah persoalan-persoalan kehutanan sedikit demi sedikit sudah bisa kita coba atasi. Sekali lagi Bapak Pimpinan yang kami hormati, dan Ibu dan Bapak Anggota yang saya cintai, terima kasih, kurang lebih mohon maaf.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih.

Dengan demikian berakhir sudah Rapat Kerja pada hari ini, atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI mengucapkan terima kasih atas hadirnya. Dan bersyukur kehadiran Allah SWT, Rapat Kerja tidak sampai sore, karena Pimpinan dan segenap Anggota DPR sudah memahami dan mempercayai komitmen KLHK kepada rakyat melalui para wakil rakyat Komisi IV DPR RI. Dengan mengucap *Alhamdulillahirabbil'alamin*, saya nyatakan ditutup

*Wallahu Muwafiq Ila Aqwamith Thariq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.20 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Drs. Achmad Agus Thomy
196508171988031002